



RENCANA AKSI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 S.D. TAHUN 2024

**PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020**

KEPULAUAN SELAYAR, 2021



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan
Telepon/Fax 021-7991770

LEMBAR PERSETUJUAN RENCANA AKSI

Nama Peserta : H. MUH. BASLI ALI
Nomor Daftar Hadir : 2.7.
Kepala Daerah : KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Nama Coach : Drs. H. EDANG MOCHAMAD KENDANA, M. Si.
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
No HP Coach : 08118870267
Email Coach : kangedang@gmail.com
Judul Rencana Aksi : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Penjamin Mutu,
Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan Dalam
Negeri

Disetujui oleh,
Coach

Dr. Dra. ROCHAYATI BASRA, M. Pd.
NIP. 196710312001122001

Drs. H. EDANG MOCHAMAD KENDANA, M.Si
NIP. 196702131986031003

Mengetahui,
Kepala BPSDM Kemendagri

Dr. TEGUH SETYABUDI, M. Pd.
NIP. 196703081993011001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana aksi disusun untuk memberikan gambaran mengenai pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan sumber daya manusia yang merupakan tugas mandatori untuk menciptakan SDM yang unggul dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan secara bertahap setiap tahunnya mulai Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, jadwal dan proporsi target, capaian target rencana aksi mulai dari dan/atau dalam triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV serta penanggung jawab masing-masing kegiatan/sub kegiatan.

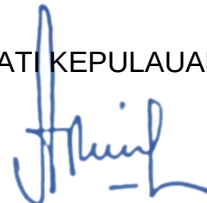
Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M. A., Ph. D., atas arahan dan dukungannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Dr. TEGUH SETYABUDI, M. Pd, atas arahan dan petunjuknya dalam penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Dra. ROCHAYATI BASRA, M. Pd., atas petunjuk dan fasilitas yang telah disiapkan dalam penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Para Narasumber dan Widyaiswara, beserta seluruh pihak yang telah memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bapak Drs. H. EDANG MOCHAMAD KENDANA, M. Si., selaku Coach yang selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 11 Juni 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. MUH. BASLI ALI


WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
H. SAIFUL ARIF, S.H.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Posisi Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar.

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin pada Desember 2020;
- Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Desember 2020;
- Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tingkat Kepangkatan pada Desember 2020;
- Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Jabatan pada Desember 2020
- Tabel 2.2.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan latar belakang pendidikan;
- Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018 – 2020 Berdasarkan Urusan Pemerintahan;
- Tabel 2.3.1. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018;
- Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019;
- Tabel 2.3.3. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020;
- Tabel 3.1. Kesenjangan Kompetensi Berdasarkan Jenjang Jabatan yang diperoleh melalui Assesment Test dan Proper Test;
- Tabel 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 – 2024 berdasarkan urusan pemerintahan;
- Tabel 4.1.1. Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022;
- Tabel 4.1.2. Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
- Tabel 4.1.3. Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

DAFTAR ISI

Halaman Judul (Cover)	1
Lembar Persetujuan Rencana Aksi	2
Kata Pengantar	3
Daftar Gambar	5
Daftar Tabel	6
Daftar Isi	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tujuan dan Manfaat	10
1.3. Ruang Lingkup	11
BAB II GAMBARAN UMUM	14
2.1. Deskripsi Lokus	14
2.2. Sumber Daya Manusia	15
2.3. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia	19
BAB III ANALISIS PERMASALAHAN DAN PERUMUSAN ISU STRATEGIS	24
3.1. Analisis Permasalahan	24
3.2. Perumusan Isu Strategis	27
BAB IV RENCANA AKSI	28
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	28
4.2. Jadwal Pelaksanaan dan Capaian Target Rencana Aksi	33
BAB V PENUTUP	96
5.1. Simpulan	96
5.2. Rekomendasi	97
Daftar Pustaka	98
Lampiran – Lampiran	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini Bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju. Oleh karena itu, pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan, mengharuskan dikembangkannya konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan masyarakat.

Hal ini telah disadari juga oleh Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019 – 2024, sehingga dalam pidato pelantikannya, telah disebutkan bahwa salah satu dari 5 (lima) aspek yang menjadi prioritas kerjanya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengundang talent-talent global untuk bekerjasama sebagai coach dalam menyelenggarakan pembangunan nasional.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlunya dikembangkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan amanat konstitusi.

Gambaran kinerja SDM aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini masih mengalami deviasi yang harus mendapat perhatian serius, diantaranya berkaitan dengan tingkat kepatuhan SDM aparatur dalam memenuhi jam kerja. Dalam aspek perilaku kerja, masih banyak ditemukan pegawai yang kurang peduli terhadap aturan kepegawaian, kurang terampil dalam bekerja, pelayanan belum maksimal, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan apabila terpaksa dan belum ada perencanaan kerja yang baik. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, peningkatan kompetensi merupakan satu hal mutlak harus dilakukan, agar dapat berkontribusi terhadap kemudahan dalam pencapaian tujuan organisasi secara khusus dan pembangunan nasional secara umum. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara (ASN). Dengan kompetensi yang baik, semua persoalan yang dihadapi masyarakat dapat terurai dan terpecahkan.

Dalam konteks Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun kedepan telah menetapkan visi, yaitu ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim di Kawasan Timur Indonesia”***, hal mana dalam mencapai visi tersebut menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor utama.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah, ***Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar*** menjadi suatu keniscayaan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dari rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Turut serta berkontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia, khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah periode 2021 – 2026 yang terintegrasi dan sistematis menjadi muatan substantif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Arahkan dalam menyusun prioritas anggaran pengembangan sumber daya manusia pada setiap penyelenggara urusan setiap tahunnya;
4. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kerja setiap SDM Aparatur untuk produktivitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai amanat Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Manfaat dari rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Terwujudnya SDM Aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki profesionalisme, sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh sehingga mampu berkinerja secara baik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima pada setiap urusan pemerintahan, baik yang bersifat konkuren, penunjang, maupun pemerintahan umum, sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi pengembangan sumber daya manusia ini, meliputi :

1. Bab I : Pendahuluan

A. Latar belakang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a) Permasalahan dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi saat ini dalam pengembangan sumber daya manusia, baik yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis internal pemerintahan daerah dan lingkungan eksternal mencakup ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat serta kearifan lokal;
- b) Tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari program pengembangan sumber daya manusia adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing tinggi serta berbasis sektor unggulan daerah;
- c) Keterkaitan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang disusun dalam rencana aksi, dengan program pengembangan sumber daya manusia yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar serta Renstra PD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d) Implikasi dari program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam upaya pencapaian visi misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Tujuan dan Manfaat

- a) Menjelaskan tujuan yang akan dicapai dari program pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah selama masa jabatan kepemimpinan kepala daerah.

- b) Menjelaskan indikator dan target kinerja pencapaian tujuan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia.

C. Ruang Lingkup

Menjelaskan secara singkat tentang isi Gambaran Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 - 2024.

2. Bab II Gambaran Umum

A. Deskripsi Lokus

Menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum kondisi wilayah dari aspek geografis, demografis, wilayah administrasi pemerintahan dan potensi sumber daya.

B. Sumber Daya Manusia

Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang jumlah latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menjelaskan gambaran tentang besaran realisasi anggaran pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan rasio perbandingan dengan belanja pegawai.

3. Bab III : Analisis Permasalahan dan Perumusan Isu Strategis

A. Analisis Permasalahan

- a) Menjelaskan hasil analisis permasalahan dibidang pengembangan sumber daya manusia berdasarkan analisis lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.
- b) Analisis lingkungan strategis dengan menggunakan berbagai metode *Balance Scorecard Analisis*.

B. Perumusan Isu Strategis

Menjelaskan rumusan isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis sebagai dasar merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Bab IV : Rencana Aksi

Menjelaskan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran rencana aksi, jadwal dan proporsi target capaian target rencana aksi mulai dari dan/atau dalam Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV serta penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan.

5. Bab V : Penutup

A. Simpulan

Menjelaskan esensi yang diambil dari beberapa ide pemikiran yang telah dibahas dalam rencana aksi.

B. Rekomendasi

Rumusan rekomendasi dari Kepala Daerah Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pusat berupa atensi untuk mendukung penerapan rencana aksi.

6. Daftar Pustaka

Daftar sumber kutipan dari pustaka, peraturan perundang-undangan, atau media cetak dan elektronik.

7. Lampiran-Lampiran

Lampiran dokumen-dokumen pendukung yang dianggap relevan dengan rencana aksi.

BAB II

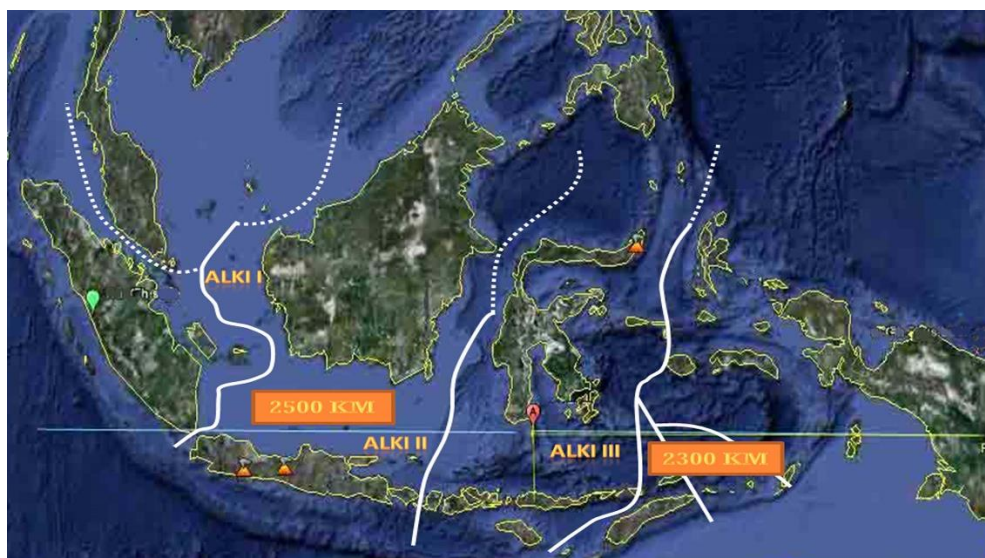
GAMBARAN UMUM

2.1. Deskripsi Lokus

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 137.071 jiwa, merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau yang berjumlah 130 pulau, 34 diantaranya berpenduduk dan sisanya 96 pulau belum berpenduduk.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 1.357,03 km². Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Selayar dan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Timur : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar



Gambar 1. Posisi Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar

Sesuai dengan karakteristik geografisnya yang dikelilingi oleh laut, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Sumberdaya Kelautan dan pariwisata bahari yang prospektif untuk dikembangkan, serta diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah ke depan.

2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan per Desember 2020 adalah 3766 Orang.

Gambaran umum Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kepangkatan, dan jabatan serta latar belakang pendidikan, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin pada Desember 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	1533	40,7%
2	Perempuan	2233	59,3%
	Jumlah	3766	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan lebih banyak dari PNS Laki-laki yaitu sebesar 59,3%, sedangkan PNS Laki-laki hanya sebesar 40,7%.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan pada Desember 2020

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
SD	7	0,2%	2	0,1%	9	0,2%
SMP	22	0,6%	3	0,1%	25	0,7%
SMA	346	9,2%	305	8,1%	651	17,3%

D1	63	1,7%	165	4,4%	228	6,1%
D2						
D3						
S1	1011	26,8%	1434	38,1%	2445	64,9%
S2						
S3						
Jumlah	1533	40,7%	2233	59,3%	3766	100%

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki latar belakang pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 2445 orang atau sebesar 64,9%, kemudian SMA/Sederajat sebanyak 651 orang atau 17,3%, selanjutnya D3 sebanyak 408 orang atau 10,8% dan D2 sebanyak 228 orang atau 6,1%. Untuk SMP/ sederajat sebanyak 25 orang atau 0,7% dan SD sebanyak 9 orang atau 0,2%.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat kepangkatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat kepangkatan pada Desember 2020

Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
I/A (Juru Muda)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
I/B (Juru Muda Tingkat I)	5	0,1%	0	0,0%	5	0,1%
I/C (Juru)	3	0,1%	0	0,0%	3	0,1%
I/D (Juru Tingkat I)	11	0,3%	3	0,1%	14	0,4%
Golongan I	19	0,5%	3	0,1%	22	0,6%
II/A (Pengatur Muda)	36	1,0%	15	0,4%	51	1,4%
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	76	2,0%	62	1,6%	138	3,7%
II/C (Pengatur)	80	2,1%	157	4,2%	237	6,3%
II/D (Pengatur Tingkat I)	112	3,0%	100	2,7%	212	5,6%
Golongan II	304	8,1%	334	8,9%	638	16,9%
III/A (Penata Muda)	242	6,4%	387	10,3%	629	16,7%
III/B (Penata Muda Tingkat I)	182	4,8%	348	9,2%	530	14,1%
III/C (Penata)	195	5,2%	382	10,1%	577	15,3%
III/D (Penata Tingkat I)	224	5,9%	344	9,1%	568	15,1%
Golongan III	843	22,4%	1461	38,8%	2304	61,2%
IV/A (Pembina)	199	5,3%	263	7,0%	462	12,3%
IV/B (Pembina Tingkat I)	138	3,7%	167	4,4%	305	8,1%

IV/C (Pembina Utama Muda)	29	0,8%	4	0,1%	33	0,9%
IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
IV/E (Pembina Utama)	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
Golongan IV	367	9,7%	435	11,6%	802	21,3%
Jumlah	1533	40,7%	2233	59,3%	3766	100,0%

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS Golongan III sebanyak 2304 orang atau sebesar 61,2% dari jumlah PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Golongan IV sebanyak 802 orang atau 21,3%, selanjutnya Golongan II sebanyak 638 orang atau 16,9% dan Golongan I sebanyak 22 orang atau 0,6%.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan pada Desember 2020

Jenis Jabatan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
Struktural	384	8,6%	317	7,1%	701	15,7%
- Eselon V	2	0,0%	7	0,2%	9	0,2%
- Eselon IV	252	5,6%	248	5,6%	500	11,2%
- Eselon III	101	2,3%	60	1,3%	161	3,6%
- Eselon II	29	0,6%	2	0,0%	31	0,7%
- Eselon I	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Fungsional Umum	548	12,3%	547	12,2%	1095	24,5%
Fungsional Tertentu	601	13,5%	1369	30,6%	1970	44,1%
Jumlah	1917	42,9%	2550	57,1%	4467	100%

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa PNS yang memilih Jabatan Fungsional Tertentu berada pada posisi teratas yaitu sebanyak 1970 orang atau sebesar 44,1% dari jumlah PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian Jabatan Fungsional Umum sebanyak 1095 orang atau 24,5% dan Jabatan Struktural sebanyak 701 orang atau 15,7%.

5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan latar belakang pendidikan, disajikan pada Tabel 2.2.5., sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Gambaran Umum Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Tahun 2020 - 2021**

No	Perangkat Daerah	Latar Belakang Pendidikan																											Jumlah									
		Ekonomi	Akuntansi	Hukum	Kesekretariatan	Psikologi	Pertanian	Perikanan	Kelautan/Perairan	Peternakan	Agama	Sains	Sastra	Parwisata	Transportasi/Perhubungan	Planologi/Tata Kota	Pertambangan	Informatika/Komputer	Kehutanan/Lingkungan	Teknik Pengairan	Teknik Sipil	Teknik Elektro	Teknik Industri	Teknik Mesin	Teknik Kimia	Teknik Perkapalan	Arsitektur	Perpustakaan/Arsip		Administrasi Negara/Publik	Sosial Politik	Kedokteran	Kesehatan	Farmasi/Apoteker	Pendidikan	Pemerintahan	Manajemen	
1	Sekretariat Daerah	34	6	36			2	2	1		2	1				1			2	1		3	4				1		30	8		1		2	3	9	89	
2	Sekretariat Dewan	3	1	3																	1							3									11	
3	Inspektoral	3	5	7			2				1							1			6	1	1			1	1	3	1		1	1	1			1	37	
4	Dinas																																				630	
	Dinas Satpol PP dan Damkar	2		3		2															1			1					9	1		1			2	23		
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1				2								6	5						1	1							5	1					5	27		
	Dinas Perikanan	1	1			5	21	7	1																					2					4	42		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1			1	1																				8	3	2				1			36		
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			1													1										1	3	3				2	2	4	17		
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7	2	2		1											1	3			1	4	1		1		1	2				4			5	35		
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	30	4	2		1																1	6			3		1				1		2	1	5	34	
	Dinas Perhubungan	1	1				1					2														9			2	1					2	7	30	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5		1	3																								1	2		1		1	3	3	20	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5																	2	2									5					1	1	36		
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6					9																			2			2			5		2	3	29		
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2				88				21										2		1										2					126	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	5		1		2	1		3																				1	2		5		5		1	26	
	Dinas Sosial	1	1	1		1										1							2						4	3		1					35	
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		3							1											7	2						3		2					1		1	23
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2		2		1											1				2	38	1		2			9		2	1						1	42
	Dinas Kesehatan		1																1							1								43	5		1	52
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	8			1	1		1				3							2			1								4					38		5	64
		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																									1											1
	5	Badan																																				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5		1		1			1												2									4	2			1		1	3	14
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2				2																								4	2			2		2	35	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	2	1														3			1	2	2					7	1				1	2	4	34		
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12	12	3									1								2								4	4				1	4	43		
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	3	2	3		1	1				2							1			2	2					1		1				2		6	25		
6	RSUD KH. Hayyung			1							1							2			1							1			21	37	8		1	173		
7	Sekretariat KPUD			1																									1	1					1		4	
8	Kecamatan																																					87
	Kecamatan Benteng	2		1													1												1	1							6	
	Kecamatan Bontolharu	1								1		1																					1			1	6	
	Kecamatan Bontolukuru	2											1																2	1		1			1	9		
	Kecamatan Bontomatene					1														1									2			2	2			8		
	Kecamatan Buki	1	1																									4	1				2		1	30		
	Kecamatan Bontomatene	2							1																			2	3				4			12		
	Kecamatan Pasimasinggu	2																										2			1			1	2	8		
	Kecamatan Pasimasinggu Timur	2				1																						2				1		2		8		
	Kecamatan Takabonerate	2															2											2					1			7		
	Kecamatan Pasimantene	1																			1							2			1			1		7		
	Kecamatan Pasilambena	2																				1		1											1	6		
9	Kelurahan																																					39
	Kelurahan Benteng	3																						1										1	1	1	7	
	Kelurahan Benteng Utara																																1	1	2		4	
	Kelurahan Benteng Selatan	1																	1												1			1		4		
	Kelurahan Putabangun	1	1																										2				1	1	1	7		
	Kelurahan Bontobangun	3	1																										2						1	7		
	Kelurahan Batangmata																										1					2		3	7			
	Kelurahan Batangmata Sapo	1																											2								3	
10	UPTD Puskesmas																1														25	37	14	1		158		
11	UPTD Satuan Non SKB Kepulauan																																	1			1	
12	UPT SPNF SKB Daratan Selayar	1																																7			9	
13	UPT Museum Nekara		1										1																				2				4	
14	UPTD Dinas Perhubungan														3			1																3		2	9	
15	UPT SMPN	5	2			1					1							7															495		5	519		
16	UPT SD																																899	1	1		901	
17	UPT TK																																	94			94	
	Jumlah																																				3097	

2.3. Realisasi Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia

Besaran realisasi anggaran pengembangan sumber daya manusia dan belanja pegawai selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun 2018 - 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2018	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.822.113.000,00	1.634.657.825,00
Jumlah	1.822.113.000,00	1.634.657.825,00

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2018	
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	347.872.970.485,00	322.253.152.475,00
Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	41.399.311.750,00	38.448.721.164,48
Jumlah	389.272.282.235,00	360.701.873.639,48

Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2019	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.388.756.818,00	2.229.433.419,00
Jumlah	2.388.756.818,00	2.299.433.419,00

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2019	
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	387.546.768.594,00	358.602.299.599,00
Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	54.621.159.170,00	50.298.688.744,08
Jumlah	442.167.927.764,00	408.900.988.343,08

Tabel 2.3.3. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2020	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	399.664.500,00	336.984.118,00
Jumlah	399.664.500,00	336.984.118,00

Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2020	
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	365.555.795.291,00	348.018.683.521,43
Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	64.955.483.775,00	57.700.192.629,70
Jumlah	430.511.279.066,00	405.718.876.151,13

Gambaran Perbandingan anggaran dan realisasi anggaran pengembangan sumber daya manusia Tahun Anggaran 2018 – 2020 berdasarkan urusan pemerintahan, disajikan pada Tabel 2.3., sebagai berikut :

No	Urusan/ Dinas/ Badan/ Kantor	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			-	-		
2	Dinas Kesehatan	73.000.000,00	4.700.000,00	20.000.000,00	18.800.000,00	20.000.000,00	17.200.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	271.500.000,00	270.520.000,00	295.420.000,00	262.870.000,00		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.000.000,00	85.405.000,00	100.000.000,00	89.950.000,00		
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.000.000,00	21.000.000,00	35.000.000,00	34.527.400,00		
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			59.985.000,00	59.985.000,00		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63.625.000,00	63.625.000,00	60.000.000,00	59.999.628,00		
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	29.863.250,00	30.000.000,00	29.592.200,00	20.023.500,00	8.100.000,00
9	Dinas Sosial	20.000.000,00	-	22.025.000,00	21.750.800,00		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	12.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.500.000,00	27.005.000,00	35.000.000,00	34.000.000,00		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	41.619.463,00	20.000.000,00	16.000.000,00		
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000,00	16.000.000,00	45.675.000,00	45.625.000,00		
14	Dinas Perhubungan	30.000.000,00	29.825.330,00	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	96.659.482,00	160.000.000,00	159.921.100,00		
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			-	-		
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.000.000,00	-	20.400.000,00	19.773.919,00		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	29.950.536,00	50.000.000,00	50.000.000,00
19	Dinas Kepariwisata	16.000.000,00	16.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00		
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	125.000.000,00	124.700.000,00	125.000.000,00	113.402.500,00		
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			45.512.000,00	44.700.107,00	18.000.000,00	17.826.700,00
22	Sekretariat Daerah	67.000.000,00	64.500.000,00	72.000.000,00	71.500.000,00	80.000.000,00	44.250.000,00

No	Urusan/ Dinas/ Badan/ Kantor	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
23	Bagian Tata Pemerintahan			-	-		
24	Bagian Ekonomi			-	-		
25	Bagian KESRA			-	-		
26	Bagian Organisasi dan Kepegawaian			-	-		
27	Bagian Pembangunan	14.200.000,00	14.000.000,00	44.599.068,00	39.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
28	Bagian Hukum	6.000.000,00	5.259.500,00	6.000.000,00	4.512.000,00		
29	Bagian Humas dan Protokol	20.000.000,00	13.500.000,00	30.000.000,00	29.324.200,00	12.750.000,00	5.154.400,00
30	Bagian Kominfo Statistik dan Persandian			-	-		
31	Bagian Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	30.000.000,00	30.000.000,00	104.000.000,00	85.250.000,00	58.050.000,00	54.405.000,00
32	Bagian Keuangan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-		
33	Bagian Umum dan Perlengkapan			-	-		
34	Bagian Pertanahan			-	-		
35	Sekretariat DPRD			-	-		
36	Kecamatan Bontomatene	31.500.000,00	18.955.500,00	15.000.000,00	7.500.000,00		
37	Kelurahan Batangmata			-	-		
38	Kelurahan Batangmata Sapo			-	-		
39	Kecamatan Buki	10.000.000,00	9.426.800,00	32.125.000,00	22.125.000,00		
40	Kecamatan Bontomanai	25.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
41	Kecamatan Benteng	12.800.000,00	12.663.500,00	12.800.000,00	12.600.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00
42	Kelurahan Benteng			-	-		
43	Kelurahan Benteng Selatan			-	-		
44	Kelurahan Benteng Utara			-	-		
45	Kecamatan Bontoharu	15.000.000,00	15.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00		
46	Kelurahan Bontobangun			-	-		

No	Urusan/ Dinas/ Badan/ Kantor	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
47	Kelurahan Putabangun			-	-		
48	Kecamatan Bontosikuyu	10.000.000,00	9.880.000,00	10.000.000,00	7.625.000,00	3.000.000,00	2.650.000,00
49	Kecamatan Taka Bonerate	20.000.000,00	17.000.000,00	20.000.000,00	-		
50	Kecamatan Pasimasunggu	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00		
51	Kecamatan Pasimasunggu Timur	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	22.500.000,00	22.125.000,00
52	Kecamatan Pasimarannu			-	-		
53	Kecamatan Pasilambena	20.000.000,00	17.000.000,00	-	-		
54	Inspektorat Daerah			-	-		
55	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	70.000.000,00	69.865.000,00	200.751.750,00	197.268.029,00		
56	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			170.000.000,00	162.525.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
57	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	375.988.000,00	372.685.000,00	497.364.000,00	483.256.000,00	30.216.000,00	30.148.018,00
JUMLAH		1.822.113.000,00	1.634.657.825,00	2.388.756.818,00	2.229.433.419,00	399.664.500,00	336.984.118,00

Rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja pengembangan sumber daya manusia dengan belanja pegawai, sebagai berikut :

1. Tahun anggaran 2018

a) Belanja pengembangan sumber daya manusia :

$$\frac{(\underline{1.634.657.825,00})}{(1.129.553.643.717,00)} \times 100 \% : 0,15 \%$$

b) Belanja pegawai :

$$\frac{(\underline{360.701.873.639,48})}{(1.129.553.643.717,00)} \times 100 \% : 31,93 \%$$

2. Tahun anggaran 2019

a) Belanja pengembangan sumber daya manusia :

$$\frac{(\underline{2.229.433.419,00})}{(1.140.315.875.264,00)} \times 100 \% : 0,20 \%$$

b) Belanja pegawai :

$$\frac{(\underline{408.900.988.343,08})}{(1.140.315.875.264,00)} \times 100 \% : 35,86 \%$$

3. Tahun anggaran 2020

a) Belanja pengembangan sumber daya manusia :

$$\frac{(\underline{336.984.118,00})}{(1.110.355.246.379,00)} \times 100\% : 0,03 \%$$

b) Belanja pegawai :

$$\frac{(\underline{405.718.876.151,13})}{(1.110.355.246.379,00)} \times 100\% : 36,54 \%$$

Berdasarkan data rasio perbandingan antara realisasi anggaran belanja pengembangan sumber daya manusia dengan belanja pegawai pada Tahun 2018 – 2019, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

BAB III

ANALISIS PERMASALAHAN DAN PERUMUSAN ISU STRATEGIS

3.1. Analisis Permasalahan

Selain dari sisi kuantitas, ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kompetensi baik teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun pemerintahan sesuai syarat jabatan pada setiap urusan pemerintahan (konkuren, penunjang, dan umum), masih belum memadai. Kondisi ini telah berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang belum optimal.

Secara ringkas, berikut ini disajikan uraian tentang analisis permasalahan Sumber Daya Manusia Aparatur baik Internal, maupun eksternal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan metode ***Balance Scorecard Analysis***, sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - a. Masih tingginya kesenjangan kompetensi yang ada dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenjang jabatan. Kesenjangan kompetensi tersebut dibuktikan melalui assesment test dan proper test.
 - b. Belum tersedianya kebutuhan tenaga pendidik dan penyelenggara pengembangan SDM, sehingga dalam pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dilaksanakan melalui bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan antara lain Puslatbang KMP LAN Makassar, BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, PPSDM Kemendagri Regional Makassar dan Perguruan Tinggi;

- c. Dari sisi sarana prasarana pengembangan kompetensi, juga belum tersedia secara layak dan memadai;
 - d. Belum tersedia perangkat pembejalaran pengembangan kompetensi;
 - e. Sementara dari sisi anggaran, alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi masih belum memadai dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan dalam proses pengembangan SDM.
2. Faktor Eksternal
- a. Akses terhadap layanan teknologi komunikasi dan informasi yang belum merata khususnya bagi Aparat yang ditugaskan di wilayah kecamatan kepulauan seperti Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu, Taka Bonerate, dan Pasilambena;
 - b. Dari sisi penyederhanaan birokrasi, tuntutan kebutuhan terhadap ketersediaan SDM Aparatur dengan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah semakin tinggi dan mendesak;
 - c. Adanya tuntutan masyarakat untuk dapat memenuhi seluruh janji politik yang telah disampaikan Bupati terpilih mengharuskan semakin mendesaknya menyiapkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi baik teknis, manajerial, sosio-kultural, dan pemerintahan pada setiap pelayanan publik yang ada.

Hasil analisis kesenjangan (gap) kompetensi terhadap 80 (delapan puluh) orang pejabat administrator dan 13 (tiga belas) pejabat pengawas melalui assesment test dan proper test dengan menggunakan metode ***Balance Scorecard Analysis***, disajikan melalui Tabel 3.1., sebagai berikut :

**TABEL 3.1. KESENJANGAN (GAP) KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR
DAN PEJABAT PENGAWAS BERDASARKAN HASIL ASSESMENT
TAHUN 2018/2019**

TABEL GAP KOMPETENSI PEJABAT ADMINISTRATOR BERDASARKAN HASIL ASSESMENT TAHUN 2018/2019				
INDIKATOR	STANDAR	KOMPETENSI	JUMLAH PEGAWAI	GAP
Berpikir Analitis	3	3,2	16	GAP
Fleksibilitas Berpikir	3	3,0	13	GAP
Adaptasi terhadap Perubahan	3	3,1	14	GAP
Integritas	3	3,1	2	GAP
Inisiatif	3	2,8	28	GAP
Berorientasi pada Kualitas	3	2,9	22	GAP
Pencerian Informasi	3	2,8	16	GAP
Komunikasi Lisan	4	3,2	43	GAP
Komunikasi Tertulis	3	2,8	15	GAP
Perencanaan	4	3,2	49	GAP
Pengorganisasian	4	3,2	54	GAP
Kepemimpinan	3	2,8	28	GAP
Membimbing	3	2,8	25	GAP
Pengambilan Keputusan	3	2,8	26	GAP

TABEL GAP KOMPETENSI PEJABAT PENGAWAS BERDASARKAN HASIL ASSESMENT TAHUN 2018/2019				
INDIKATOR	STANDAR	KOMPETENSI	JUMLAH PEGAWAI	GAP
Berpikir Analitis	3	3,2	2	GAP
Fleksibilitas Berpikir	3	3,0	3	GAP
Adaptasi terhadap Perubahan	3	3,1	0	-
Integritas	3	3,1	0	-
Inisiatif	3	2,8	3	GAP
Berorientasi pada Kualitas	3	2,9	1	GAP
Pencerian Informasi	3	2,8	3	GAP
Komunikasi Lisan	4	3,2	9	GAP
Komunikasi Tertulis	3	2,8	3	GAP
Perencanaan	4	3,2	10	GAP
Pengorganisasian	4	3,2	9	GAP
Kepemimpinan	3	2,8	5	GAP
Membimbing	3	2,8	3	GAP
Pengambilan Keputusan	3	2,8	3	GAP

3.2. Perumusan Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 3.1 di atas, dapat dirumuskan isu strategis, yaitu :

Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

RENCANA AKSI

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Rencana aksi pengembangan sumber daya manusia merupakan kompilasi dari seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengembangan kompetensi yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD) yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia dan Renstra - PD lainnya.

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal, non-klasikal atau melalui kombinasi pelatihan klasikal dan non-klasikal.

Bentuk pengembangan kompetensi klasikal antara lain :

- a. Pelatihan;
- b. Seminar;
- c. Workshop;
- d. Kursus;
- e. Penataran;
- f. Bimbingan Teknis;
- g. Sosialisasi;
- h. Orientasi; dan
- i. Pembekalan atau pelatihan klasikal lainnya.

Bentuk pengembangan kompetensi non klasikal antara lain :

- a. Coaching;
- b. Mentoring;
- c. E-learning;
- d. Pelatihan Jarak Jauh
- e. Detasering (*secondment*);

- f. Pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
- g. Patok banding (*benchmarking*); dan
- h. Jalur pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non klasikal lainnya.

Sedangkan kombinasi pengembangan kompetensi klasikal dan non klasikal antara lain seperti melalui pelatihan sekaligus coaching atau mentoring.

Program Pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang disusun dalam rencana aksi ini, dikelompokkan dan diuraikan kedalam kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, antara lain :
 - a. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, antara lain :
 - 1) Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran pada seluruh urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - 2) Diklat Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada seluruh urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.
 - b. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi penyelenggara perangkat daerah penunjang, antara lain :
 - 1) Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Diklat Keuangan Daerah;
 - 3) Diklat Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- c. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis penyelenggara urusan pemerintahan umum, antara lain :
 - 1) Diklat Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Diklat Penguatan Ketahanan Negara;
 - 3) Diklat Pengendalian Konflik Sosial.
- 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, antara lain Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan urusan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, disajikan dalam Tabel 4.1., dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2022 – 2024, disajikan pada Tabel 4.1.1., Tabel 4.1.2., dan Tabel 4.1.3., sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 - 2024**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2023			Instansi Penyelenggara	
				Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		
				Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Seluruh Sektor Pemerintahan	A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1433	Orang	9.962.105.000	1194	Orang	8.789.455.000	1380	Orang	9.065.105.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
		I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	994	Orang	5.961.000.000	775	Orang	5.174.000.000	941	Orang	5.064.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
		1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	790	Orang	4.700.000.000	577	Orang	3.945.000.000	744	Orang	3.940.000.000	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
		1.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	314		1.790.000.000	310	Orang	1.770.000.000	307	Orang	1.755.000.000	BKPSDM	
		1.1.1.1	Urusan Pendidikan	137	Orang	835.000.000	135	Orang	825.000.000	136	Orang	830.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas Dikpora
		1.1.1.2	Urusan Kesehatan	49	Orang	245.000.000	49	Orang	245.000.000	49	Orang	245.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas Kesehatan
		1.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	Orang	100.000.000	14	Orang	100.000.000	11	Orang	85.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas PUPR
		1.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	DPKP
		1.1.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	79	Orang	425.000.000	77	Orang	415.000.000	76	Orang	410.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas Satpol PP, Damkar, & Penyelamatan
		1.1.1.6	Urusan Sosial	27	Orang	135.000.000	27	Orang	135.000.000	27	Orang	135.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas Sosial
		1.1.1.7	Urusan Penanggulangan Bencana	5	Orang	35.000.000	5	Orang	35.000.000	5	Orang	35.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	BPBD
		1.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	397		1.995.000.000	267	Orang	1.335.000.000	275	Orang	1.375.000.000	BKPSDM	
		1.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja	19		105.000.000	17	Orang	85.000.000	17	Orang	85.000.000	BKPSDM/ Pusdiklat Kemnaker	Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	21		105.000.000	21	Orang	105.000.000	18	Orang	90.000.000	BKPSDM	Dinas P3AP2KB
		1.1.2.3	Urusan Pertanian (Pangan)	27		135.000.000	27	Orang	135.000.000	27	Orang	135.000.000	BKPSDM	Distan KP
		1.1.2.4	Urusan Lingkungan Hidup	23		115.000.000	22	Orang	110.000.000	22	Orang	110.000.000	BKPSDM	DLH
		1.1.2.5	Urusan Kependudukan dan Capil	97		485.000.000	15	Orang	75.000.000	14	Orang	70.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas Dukpencapil
		1.1.2.6	Urusan Masyarakat dan Desa	104		520.000.000	74	Orang	370.000.000	93	Orang	465.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Dinas PMD
		1.1.2.7	Urusan Perhubungan	7		35.000.000	6	Orang	30.000.000	5	Orang	25.000.000	BKPSDM	Dishub
		1.1.2.8	Urusan Komunikasi dan Informatika	23		115.000.000	16	Orang	80.000.000	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Dinas Kominfo, Statistik, & Persandian
1.1.2.9	Urusan Koperasi dan UKM	18		90.000.000	13	Orang	65.000.000	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Dinas Perindag KUM		
1.1.2.10	Urusan Penanaman Modal	29		145.000.000	29	Orang	145.000.000	29	Orang	145.000.000	BKPSDM/ BKPM	Dinas PMPTSPTK		

		1.1.2.11	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	3		15.000.000	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	Dinas Dikpora
		1.1.2.12	Urusan Statistik dan Persandian	9		45.000.000	7	Orang	35.000.000	6	Orang	30.000.000	BKPSDM	Dinas Kominfo, Statistik, & Persandian
		1.1.2.13	Urusan Perpustakaan dan Arsip	17		85.000.000	17	Orang	85.000.000	17	Orang	85.000.000	BKPSDM/ Pusnas	Dinas PK
		1.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	183		915.000.000	168	Orang	840.000.000	162	Orang	810.000.000	BKPSDM	
		1.1.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	15		75.000.000	15	Orang	75.000.000	10	Orang	50.000.000	BKPSDM	Dinas Kelautan
		1.1.3.2	Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	35		175.000.000	33	Orang	165.000.000	35	Orang	175.000.000	BKPSDM/ Kemenparekraf	Disparbud
		1.1.3.3	Urusan Pertanian (selain pangan) dan Peternakan	68		340.000.000	61	Orang	305.000.000	61	Orang	305.000.000	BKPSDM	Distan KP
		1.1.3.4	Urusan Energi Baru Terbarukan	6		30.000.000	6	Orang	30.000.000	5	Orang	25.000.000	BKPSDM	Dishub
		1.1.3.5	Urusan Perdagangan	7		35.000.000	4	Orang	20.000.000	7	Orang	35.000.000	BKPSDM	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6	Urusan Perindustrian	52		260.000.000	49	Orang	245.000.000	44	Orang	220.000.000	BKPSDM	Dinas Perindag KUM
		1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Penyelenggara Perangkat Daerah Penunjang	201	Orang	1.246.000.000	195	Orang	1.214.000.000	194	Orang	1.109.000.000	BKPSDM	
		1.2.1	Urusan Bappelitbangda	14		126.000.000	14	Orang	126.000.000	14	Orang	26.000.000	BKPSDM/ Bappenas	Bappelitbangda
		1.2.2	Urusan BPKPAD	16		96.000.000	16	Orang	96.000.000	16	Orang	96.000.000	BKPSDM/ Pusdiklat Kemenkeu	BPKPD
		1.2.3	Urusan BKPSDM	34		204.000.000	34	Orang	204.000.000	34	Orang	204.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	BKPSDM
			Unsur Pendukung Pemerintahan	54		405.000.000	52	Orang	393000000	52	Orang		BKPSDM	
		1.2.4	Urusan Sekretariat Daerah	19		105.000.000	17	Orang	93.000.000	17	Orang	93.000.000	BKPSDM	SETDA
		1.2.5	Urusan Sekretariat DPRD	35		300.000.000	35	Orang	300.000.000	35	Orang	300.000.000	BKPSDM	Sekretariat DPRD
			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			415.000.000		Orang			Orang		BKPSDM	
		1.2.6	Urusan Inspektorat	83		415.000.000	79	Orang	395.000.000	78	Orang	390.000.000	BKPSDM	Inspektorat
		1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	
		1.2.7	Urusan Kesbangpol	3		15.000.000	3	Orang	15.000.000	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	Badan Kesbangpol
		II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	439	Orang	4.001.105.000	419	Orang	3.615.455.000	439	Orang	4.001.105.000	BKPSDM	
		2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	439	Orang	4.001.105.000	419	Orang	3.615.455.000	439	Orang	4.001.105.000	BKPSDM/ Pusdiklatwas BPKP/ BPSDM Kemendagri/ Badan Diklat BPK/ Pusbangpeg ASN BKN/ Pusbindiklatren Bappenas/ Pusdiklat Kemenkeu/ Pusdiklat Kemnaker/ Penyelenggara Lainnya	
			JUMLAH	1872	Orang	9.962.105.000	1.194	Orang	8.789.455.000	1.380	Orang	9.065.105.000		

4.2. Jadwal Pelaksanaan dan Capaian Target Rencana Aksi

Program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran rencana aksi pengembangan sumber daya manusia, jadwal dan proporsi target capaian target rencana aksi mulai dari dan/atau dalam Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV serta penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan, disajikan pada Tabel 4.1.1, Tabel 4.1.2, dan Tabel 4.1.3., sebagai berikut :

**Tabel 4.1.1. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan Kompetensi setiap triwulan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Seluruh Sektor Pemerintahan	A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1433	Orang	9.962.105.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		994	Orang	5.961.000.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		1.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren		790	Orang	4.700.000.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		1.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		314	Orang	1.790.000.000								
		1.1.1.1	Urusan Pendidikan		137	Orang	35.000.000								
		1.1.1.1.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pendidikan	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1					Disdikpora
		1.1.1.1.2	Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing dan mendidik dengan baik	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)		30				Disdikpora
		1.1.1.1.3	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD	Jumlah PAUD yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing, mendidik dan membina dengan baik	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Guru PAUD			11			Disdikpora
		1.1.1.1.4	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki Kepala Sekolah yang bersertifikat dan mampu melakukan manajemen sekolah	30	Orang	300.000.000	BKPSDM	Guru / Kepala Sekolah				30		Disdikpora
		1.1.1.1.5	Diklat Penyusunan Kurikulum dan Silabus	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kurikulum dan silabus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	1					Disdikpora
		1.1.1.1.6	Diklat Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu mengembangkan teknologi pembelajaran bagi TK, SD, dan SMP	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru		30				Disdikpora
		1.1.1.1.7	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran serta dapat membangun minat belajar murid/siswa	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru		30				Disdikpora
		1.1.1.1.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengembangan Kepemudaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pelatih kepemudaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan Guru			1			Disdikpora

	1.1.1.1.9	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Kepramukaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pelatih kepramukaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan Guru			1		Disdikpora
	1.1.1.1.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pelatih cabang olahraga tertentu	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Disdikpora
	1.1.1.2	Urusan Kesehatan		49	Orang	245.000.000							
	1.1.1.2.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Kesehatan	Jumlah pegawai perencanaan yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Kesehatan
	1.1.1.2.2	Diklat Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			12		Dinas Kesehatan
	1.1.1.2.3	Diklat Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitator pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
	1.1.1.2.4	Diklat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu melakukan pelayanan kesehatan prima	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	12				Dinas Kesehatan
	1.1.1.2.5	Diklat Higiene, Sanitasi Makanan dan Minuman	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu menerapkan higiene, sanitasi makanan dan minuman	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				12	Dinas Kesehatan
	1.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		14	Orang	100.000.000							
	1.1.1.3.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Jumlah pegawai perencanaan yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas PUPR
	1.1.1.3.2	Diklat Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1			Dinas PUPR
	1.1.1.3.3	Diklat Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
	1.1.1.3.4	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
	1.1.1.3.5	Diklat Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu memelihara jalan dan jembatan secara berkelanjutan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
	1.1.1.3.6	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara irigasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
	1.1.1.3.7	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara sungai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
	1.1.1.3.8	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Rawa	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara rawa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR

		1.1.1.3.9	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Pantai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara pantai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.10	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang ramah lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.11	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.12	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	2				Dinas PUPR
		1.1.1.3.13	Diklat Pengelolaan Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola data pengadaan barang dan jasa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas PUPR
		1.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3	Orang	15.000.000							
		1.1.1.4.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.2	Diklat Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai yang mampu menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyehatan Lingkungan Perumahan	Jumlah pelatih pelatihan penyehatan lingkungan perumahan bagi Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		79	Orang	425.000.000							
		1.1.1.5.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.2	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis dasar kepomongprajaan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP			30		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.3	Diklat Pemadam Kebakaran	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi teknis di bidang pemadam kebakaran	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran			30		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.4	Diklat Investigator Kebakaran	Jumlah pegawai yang mampu melakukan investigasi pasca kebakaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran				1	Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.5	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi PNS yang melakukan pelanggaran hukum	2	Orang	40.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)		2			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

	1.1.1.5.6	Diklat Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu menegakkan Peraturan Daerah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Satpol PP				2	Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.7	Diklat Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang memiliki anggota Satpol PP yang mampu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		11			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.8	Diklat Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam penanganan bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran	1				Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.9	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran		1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.6	Urusan Sosial		27	Orang	135.000.000							
	1.1.1.6.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Sosial	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Sosial
	1.1.1.6.2	Diklat Perencana Sosial	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
	1.1.1.6.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Sosial	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan sosial pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
	1.1.1.6.4	Diklat Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Sosial
	1.1.1.6.5	Pengelolaan Sistem Informasi Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sistem informasi fakir miskin	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Sosial
	1.1.1.6.6	Diklat Pendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki petugas pendata PMKS/PSKS	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Sosial
	1.1.1.6.7	Diklat Pengelolaan Data PMKS/PSKS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola data PMKS/PSKS secara efektif	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Sosial
	1.1.1.7	Urusan Penanggulangan Bencana		5	Orang	35.000.000							
	1.1.1.7.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				BPBD

		1.1.1.7.2	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	1				BPBD
		1.1.1.7.3	Diklat Rencana Kontingensi	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana tanggap darurat kebencanaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			BPBD
		1.1.1.7.4	Diklat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melakukan penanganan darurat bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		BPBD
		1.1.1.7.5	Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Jumlah pegawai yang mampu mengkaji kerugian dan kebutuhan pasca bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		BPBD
		1.1.2	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar		293	Orang	1.995.000.000							
		1.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja		19	Orang	105.000.000							
		1.1.2.1.1	Diklat Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.2	Diklat Training of Taining (TOT) Pelatihan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Tenaga Kerja	Jumlah pelatih pelatihan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.3	Diklat Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.4	Diklat Pendataan dan Pengelolaan Data Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu mendata dan mengolah data tenaga kerja pada setiap Kecamatan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah pelatih pelatihan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.6	Diklat Mediator Hubungan Industrial	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis sebagai mediator hubungan industrial	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.7	Diklat Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan tugas perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.8	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis sebagai PPNS dibidang Ketenagakerjaan	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.9	Diklat Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi pasar kerja (bursa kerja) daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		21	Orang	105.000.000							
		1.1.2.2.1	Training of Trainers (TOT) Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah fasilitator bimtek pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas P3AP2KB

		1.1.2.2.2	Diklat Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengarusutamaan gender di bidang infrastruktur	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.3	Diklat Sistem Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sistem data terpilah, statistik gender dan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.4	Diklat Pelayanan Perlindungan Anak	Jumlah petugas pelayanan perlindungan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.5	Diklat Aksi Afirmasi Perlindungan Anak	Jumlah pegawai yang mampu melakukan aksi afirmasi perlindungan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.6	Diklat Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Gender	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana				1	Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.7	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.9	Diklat Fasilitasi Keberlangsungan Ber-KB	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu memfasilitasi keberlangsungan ber-KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelatih pelatihan kesehatan reproduksi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.11	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan KB	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.3	Urusan Pertanian (Pangan)		27	Orang	135.000.000							
		1.1.2.3.1	Diklat Pendataan Hasil Pertanian	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu mendata hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.2	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan	Jumlah pelatih pelatihan pengembangan produk olahan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal	Jumlah pelatih pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku lokal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.4	Diklat Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitator yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.5	Diklat Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.6	Diklat Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan manajemen ketahanan pangan dan gizi berbasis kemandirian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

		1.1.2.3.7	Diklat Pengawasan Keamanan Makanan Segar	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas pengawasan keamanan makanan segar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.4	Urusan Lingkungan Hidup		23	Orang	115.000.000							
		1.1.2.4.1	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelatih pelatihan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.2	Diklat Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Kelembagaan Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat secara efektif	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.3	Diklat Manajemen dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Sampah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sampah berdasarkan 3R	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.4	Diklat Pengelolaan Air dan Limbah Cair	Jumlah pegawai yang mampu mengelola air dan limbah cair	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.5	Diklat Audit, Efisiensi dan Konservasi Air	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis audit, efisiensi dan konservasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.6	Diklat Sistem Manajemen Energi (ISO 50001: 2011)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen energi yang berstandar ISO 50001:2018	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.7	Diklat Audit Lingkungan untuk Sertifikasi Lingkungan	Jumlah pegawai yang mampu mengaudit dan menjamin kesehatan lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.8	Diklat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen lingkungan yang berstandar ISO 14001:2015	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.9	Diklat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001:2007)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berstandar OHSAS 18001:2007	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.10	Diklat Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola bahan beracun dan berbahaya (limbah B3)	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.11	Diklat Pengelolaan Limbah Domestik (Sewage Treatment Plant)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola limbah domestik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.12	Diklat Sistem Manajemen Laboratorium (ISO/IEC 17025:2005)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen laboratorium yang berstandar ISO/IEC 17025:2005	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.4.13	Diklat Pemantauan Kualitas Mangrove	Jumlah petugas yang mampu melakukan pemantauan kualitas mangrove	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
		1.1.2.5	Urusan Kependudukan dan Capil		97	Orang	485.000.000							
		1.1.2.5.1	Diklat bagi petugas front office dan back office pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah petugas front office dan back office yang mampu memberikan pelayanan prima	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		10			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	1.1.2.5.2	Diklat Teknis Registrasi Kependudukan	Jumlah petugas registrasi Desa/Kelurahan yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		30	30	27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.1.2.6	Urusan Masyarakat dan Desa		104	Orang	520.000.000							
	1.1.2.6.1	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11			Dinas PMD
	1.1.2.6.2	Diklat Pembangunan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pembangunan masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11		Dinas PMD
	1.1.2.6.3	Diklat Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana				11	Dinas PMD
	1.1.2.6.4	Diklat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11			Dinas PMD
	1.1.2.6.5	Diklat Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pembangunan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
	1.1.2.6.6	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatih pelatihan pengelolaan keuangan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
	1.1.2.6.7	Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola badan usaha milik desa (BUMDes)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11			Dinas PMD
	1.1.2.6.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelatih pelatihan administrasi pemerintahan desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas PMD
	1.1.2.6.9	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan produk hukum desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas PMD
	1.1.2.6.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas PMD
	1.1.2.6.11	Diklat Pendataan Potensi Penduduk	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan potensi penduduk dengan akurat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11			Dinas PMD
	1.1.2.6.12	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan standar pelayanan minimal desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas PMD
	1.1.2.6.13	Diklat Administrasi Perkantoran bagi Sekretaris Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang memahami tentang administrasi desa	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			30		Dinas PMD
	1.1.2.6.14	Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Desa	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sistem keuangan desa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		2			Dinas PMD
	1.1.2.7	Urusan Perhubungan		7	Orang	35.000.000							
	1.1.2.7.1	Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis penguji kendaraan bermotor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.2.7.2	Diklat Pengelola Terminal Bus	Jumlah pegawai yang mampu mengelola terminal bus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf UPT Terminal			1		Dinas Perhubungan
	1.1.2.7.3	Diklat Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan

		1.1.2.7.4	Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Usaha Angkutan Laut, Sungai dan Danau serta Pelayaran Rakyat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun SOP perizinan usaha ASDP dan pelayaran rakyat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perhubungan
		1.1.2.7.5	Diklat Pengelolaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			3		Dinas Perhubungan
		1.1.2.8	Urusan Komunikasi dan Informatika		23	Orang	115.000.000							
		1.1.2.8.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.2	Diklat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis mengelola informasi dan komunikasi publik Pemda	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.3	Diklat Pengelolaan e-Government Daerah Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berbasis e-government	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.4	Diklat Jaringan Komputer dan Sistem Layanan Administrasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis membangun jaringan komputer dan sistem layanan administrasi berbasis IT	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.5	Diklat Sub Bidang Jasa Multimedia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jasa multimedia	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.6	Diklat Kehumasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang kehumasan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.7	Diklat Jaringan Telekomunikasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jaringan telekomunikasi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.8	Diklat Keahlian Grafis	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan dan mendesain data dan informasi dalam bentuk grafis	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.9	Diklat Manajemen Layanan TI	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya teknologi informasi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.10	Diklat Pengembangan Pembuatan (Development) TI	Jumlah pegawai yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi informasi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.11	Diklat Pemeliharaan (Maintenance) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memelihara perangkat komputer secara berkala	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.12	Diklat Piranti Lunak (Software) dan Keras (Hardware) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memperbaiki piranti lunak dan keras komputer secara berkala	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.9	Urusan Koperasi dan UKM		18	Orang	90.000.000							
		1.1.2.9.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	2				Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.2	Diklat Perkoperasian	Jumlah pegawai yang mampu membina koperasi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM

		1.1.2.9.3	Diklat Kewirausahaan	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi peningkatan kewirausahaan di desa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.4	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Keterampilan Teknis Koperasi dan UMKM	Jumlah pelatih pelatihan keterampilan teknis koperasi dan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelola Koperasi	Jumlah pelatih pelatihan pengelola koperasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.6	Diklat Pengembangan Lembaga UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan lembaga UMKM	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.7	Diklat Pengembangan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi koperasi dan UMKM	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.8	Diklat Perkoperasian Berbasis Syariah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan perkoperasian berbasis syariah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.9	Diklat Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi dan membina koperasi simpan pinjam	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.10	Diklat Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pengembangan industri kecil dan menengah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.10	Urusan Penanaman Modal		29	Orang	145.000.000							
		1.1.2.10.1	Diklat Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu menyusun dan mengelola peta potensi investasi daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.2	Diklat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.3	Diklat Pengelolaan Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelaksanaan penanaman modal di daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.4	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal : Substansi OSS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis Online Single Submission (OSS)	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.5	Diklat promosi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu melakukan promosi di bidang penanaman modal	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.6	Diklat Job Instruction Training	Jumlah pegawai yang mampu menyusun job instruction	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.7	Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis penyelenggaraan PTSP secara optimal	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.8	Bimtek Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	Jumlah pegawai yang mampu menyelenggarakan PTSP sesuai kualifikasi tertentu	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.11	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		3	Orang	15.000.000							
		1.1.2.11.1	Penerapan NSPK bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

		1.1.2.11.2	Diklat Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah pegawai yang mampu membina dan mengembangkan organisasi kepemudaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.11.3	Diklat Training of Training (TOT) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pelatih pelatihan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.12	Urusan Statistik dan Persandian		9	Orang	45.000.000							
		1.1.2.12.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Statistik dan Persandian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.2	Diklat Pengelolaan Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola statistik sektoral	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.3	Diklat Pemanfaatan Data Ekonomi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan memanfaatkan data statistik ekonomi daerah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.4	Diklat Teknis Dasar-dasar Keamanan Jaringan dan Teknologi Informasi (Fundamental Network Security)	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan melindungi sistem jaringan dari serangan cyber	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.5	Diklat Teknis Kriptografi Simetrik, Asimetrik dan Steganografi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang simetrik, asimetrik dan steganografi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.6	Diklat Teknis Pengelolaan Database Persandian	Jumlah pegawai yang mampu mengelola database persandian daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.13	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan		17	Orang	85.000.000							
		1.1.2.13.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.2	Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Tenaga Pustakawan		1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.3	Diklat Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi masyarakat desa dan sekolah untuk meningkatkan minat dan gemar membaca	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.4	Diklat Manajemen Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi		1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.5	Diklat Pengembangan Perpustakaan (Berbasis Komputer)	Jumlah pegawai yang mampu membangun sistem perpustakaan elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.6	Diklat Pemeliharaan Koleksi	Jumlah pegawai yang mampu memelihara koleksi perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.7	Diklat Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Jumlah pegawai yang mampu mengelola arsip statis dan dinamis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan		183	Orang	915.000.000							
		1.1.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan		15	Orang	75.000.000							

		1.1.3.1.1	Bimtek Training of trainers (TOT) Pelatihan Budidaya Rumput Laut	Jumlah Kecamatan yang memiliki pelatih pelatihan budidaya rumput laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Bidang Perikanan Budidaya		1			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.2	Magang Juru Lelang komoditas laut	Jumlah Desa pesisir yang memiliki juru Lelang komoditas laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.3	Bimtek Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina mutu dan keamanan hasil perikanan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		2			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.4	Bimtek Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek manajemen pengendalian hama dan penyakit ikan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.5	Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan				2	Dinas Perikanan
		1.1.3.1.6	Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		1			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.7	Bimtek Training of trainers (TOT) Pengolahan Komoditas Laut (Panen dan Pasca Panen)	Jumlah Desa dengan petugas pemberdayaan nelayan yang memiliki kompetensi teknis bidang pengolahan budidaya laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		1			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.8	Bimtek Bagi Petugas Pembina Pengelolaan Pemberian Pakan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina pengelolaan pemberian pakan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		2			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.9	Bimtek Bagi Petugas Pembina Teknik Pembuatan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina teknik pembuatan alat tangkap ikan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		2			Dinas Perikanan
		1.1.3.1.10	Bimtek Training of trainers (TOT) Pelatihan Budidaya Ikan Karang Bernilai Ekonomis Tinggi	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek budidaya ikan karang bernilai ekonomis tinggi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		1			Dinas Perikanan
		1.1.3.2	Urusan Pariwisata dan Kebudayaan		35	Orang	175.000.000							
		1.1.3.2.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.2	Diklat Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola obyek dan daya tarik wisata (ODTW) daerah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.3	Diklat Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengidentifikasi dan mengelola kawasan strategis pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.4	Diklat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.5	Diklat Pemasaran Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata baik domestik dan mancanegara	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.6	Diklat Kantor Depan (Front Office)	Jumlah pegawai yang mampu melayani wisatawan secara prima	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.7	Diklat Agen Perjalanan (Travel Agencies)	Jumlah pegawai yang mampu mendesain dan mengelola paket perjalanan wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.8	Diklat Pemandu Wisata	Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang memiliki petugas pemandu wisata yang memiliki kompetensi teknis	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		1.1.3.2.9	Diklat Pengembangan Wisata Religi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan obyek dan daya tarik wisata religi	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			4		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.10	Diklat Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu membangun kemitraan pengembangan dan promosi wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi			2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.11	Diklat Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya pariwisata berbasis masyarakat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.12	Diklat Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola kesenian daerah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.3	Urusan Pertanian (selain pangan) dan Peternakan		68	Orang	340.000.000							
		1.1.3.3.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pertanian dan Peternakan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.2	Diklat Pengawasan dan Pembinaan	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Juru Sembelih Halal	Jumlah pelatih pelatihan juru sembelih halal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.4	Diklat Produksi Benih Tanaman	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang produksi benih tanaman	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf UPTD Pembenhian			2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.5	Diklat Fasilitator Tanaman Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator tanaman organik	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.6	Diklat Fasilitator Ternak Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator ternak organik	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.7	Diklat Teknologi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan teknologi pertanian	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.8	Diklat Komoditi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan komoditi pertanian	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.9	Diklat Budidaya Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan budidaya pertanian	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.10	Diklat Agrobisnis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang agrobisnis	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.11	Diklat Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP)	Jumlah penyuluh yang memperoleh pengetahuan baru	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Penyuluh Pertanian		30			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.12	Diklat Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengawas benih tanaman	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.4	Urusan Energi Baru Terbarukan		6	Orang	30.000.000							
		1.1.3.4.1	Diklat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Bagi Operator dan/atau Pengelola	Jumlah operator/ pengelola yang mampu mengusahakan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana		1			Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.2	Diklat Teknis Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengelolaan PLTS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.3	Diklat Teknis Perencanaan dan Pembangunan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan pembangunan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan

		1.1.3.4.4	Diklat Teknis Pemasangan dan Pemeliharaan Solar Home Sistem (SHS)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemasangan dan pemeliharaan peralatan SHS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.5	Diklat Teknis Evaluasi Perencanaan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu mengevaluasi perencanaan pembangunan PLTS terpusat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.6	Diklat Teknis Uji Laik Operasi PLTS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengujian kelayakan operasi PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.5	Urusan Perdagangan		7	Orang	35.000.000							
		1.1.3.5.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perindag KUM
		1.1.3.5.2	Diklat Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pasar rakyat dan mengurus perizinan toko swalayan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.5.3	Diklat Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin bidang Perdagangan	Jumlah Pegawai yang mampu memahami dan menerapkan SOP perizinan dagang	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.5.4	Diklat Pengelolaan Sarana Industri Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pemanfaatan sarana industri dagang	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6	Urusan Perindustrian		52	Orang	260.000.000							
		1.1.3.6.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perindustrian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.2	Diklat Perencanaan Pengembangan Industri Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengembangan industri daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.3	Diklat Teknik Pembuatan Produk Kerajinan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pembuatan produk kerajinan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.4	Diklat Fasilitator Good Manufacturing Practices (GMP)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator GMP	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.5	Diklat Desain Produk Industri dan Kemasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mendesain produk industri dan kemasan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.6	Diklat Penguji Mutu Barang	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penguji mutu barang	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.7	Diklat Manajemen Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajemen industri	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.8	Diklat Penyuluh Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyuluh industri	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.9	Diklat Desain Grafis dan Advertising	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi desain grafis dan periklanan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Produksi Olahan Ikan dan Daging	Jumlah pelatih pelatihan produksi olahan ikan dan daging	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.11	Diklat Training of Trainers (TOT) Produksi Kerajinan Bambu dan Kayu	Jumlah pelatih pelatihan produksi olahan ikan dan daging	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.12	Diklat Teknik Penyusunan Perencanaan Bisnis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis menyusun perencanaan bisnis	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Perindag KUM

	1.1.3.6.13	Diklat Strategi Promosi dan Penjualan Melalui Internet	Jumlah pegawai yang mampu menyusun strategi promosi dan penjualan berbasis elektronik	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.14	Diklat Manajemen Keuangan UMKM	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial dibidang keuangan UMKM	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.15	Diklat Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar	Jumlah pegawai yang mampu mengelola usaha perdagangan pasar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.16	Diklat Manajemen Bisnis untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial bisnis dibidang PKL	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
	1.2	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi penyelenggara perangkat daerah penunjang		201	Orang	1.246.000.000							
	1.2.1	Urusan Bappelitbangda		14	Orang	126.000.000							
	1.2.1.1	Diklat Penyusunan RPJMD	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RPJMD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	1.2.1.2	Diklat Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun Renstra PD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	1.2.1.3	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana kerja pemerintah daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	1.2.1.4	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RKPd	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	1.2.1.5	Diklat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	1.2.1.6	Diklat Reviu RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mereviu RPJMD, RKPd, Renstra PD dan Renja PD	4	Orang	36.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana			4		Bappelitbangda
	1.2.2	Urusan BPKPAD		16	Orang	96.000.000							
	1.2.2.1	Diklat Penganggaran Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.2	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang perbendaharaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.3	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.4	Diklat Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.5	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan barang milik daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.6	Diklat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
	1.2.2.7	Diklat Penilaian Aset	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian aset	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD

		1.2.2.8	Bimtek Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman dibidang keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan bendahara		2			BKPAD
		1.2.3	Urusan BKPSDM		34	Orang	204.000.000							
		1.2.3.1	Diklat Manajemen Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman ruang lingkup manajemen PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
		1.2.3.2	Diklat Komunikasi Efektif	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman tentang komunikasi efektif	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPSDM
		1.2.3.3	Bimtek Persiapan Pensiun (Purna Bhakti) PNS	Jumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun yang mengikuti bimbingan purna bhakti	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Pegawai yang memasuki masa pensiun			2		BKPSDM
		1.2.3.4	Diklat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu mengelola administrasi kepegawaian	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.5	Diklat Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kebutuhan formasi dan pengadaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.6	Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SKP	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.7	Diklat Penilaian Kinerja PNS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian kinerja PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.8	Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah pegawai yang mampu menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
		1.2.3.9	Diklat Manajemen Talenta	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen talenta	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.10	Diklat Pengembangan dan Pola Karir PNS	Jumlah pegawai yang mampu menyusun pola dan pengembangan karir PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.11	Diklat Penegakan Disiplin PNS	Jumlah pegawai yang mampu memahami ruang lingkup penegakan disiplin PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.12	Diklat Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola promosi dan mutasi PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.13	Diklat Kepangkatan PNS	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup kepangkatan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.14	Bimtek Tata Cara Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang tata cara pemberian penghargaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPSDM
		1.2.3.15	Bimtek Perlindungan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang perlindungan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPSDM
			Urusan Pendukung Pemerintahan		19	Orang	405.000.000							
		1.2.4	Urusan Sekretariat Daerah		19	Orang	105.000.000							
		1.2.4.1	Diklat Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menyusun Perda dan Perkada	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bagian Hukum

	1.2.4.2	Diklat Penanganan Perkara	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menangani perkara di lingkup pemerintah daerah	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
	1.2.4.3	Diklat Sistem Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi merencanakan dan membangun JDIIH pemerintah daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bagian Hukum
	1.2.4.4	Diklat Advokasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang advokasi hukum	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Hukum
	1.2.4.5	Diklat Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah pegawai yang mampu menyusun anjab dan abk	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bagian Organisasi
	1.2.4.6	Diklat Pengembangan Organisasi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan kebutuhan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Organisasi
	1.2.4.7	Diklat Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah pegawai yang mampu menyusun evjab	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Organisasi
	1.2.4.8	Diklat Manajemen Perkantoran Modern	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen perkantoran modern	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
	1.2.4.9	Diklat Menyusun Telaahan Staf dan Paripurna	Jumlah pegawai yang mampu menyusun telaahan staf dan paripurna	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
	1.2.4.10	Bimtek Tata Cara Penyusunan SOP	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SOP	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.11	Diklat Tata Naskah Dinas/ Elektronik	Jumlah pegawai yang mampu menguasai tata naskah dinas dan tata naskah elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.12	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	1.2.4.13	Bimtek Tata Cara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.14	Diklat Penataan Ruang Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.15	Diklat Penataan Lingkungan Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan lingkungan kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.16	Diklat Keprotokolan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang keprotokolan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
	1.2.5	Urusan Sekretariat DPRD		35	Orang	300.000.000							
	1.2.5.1	Bimtek Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	25	Orang	250.000.000	BKPSDM	Anggota DPRD			25		Sekretariat DPRD
	1.2.5.2	Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	10	Orang	50.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		10			Sekretariat DPRD
		Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		83	Orang	415.000.000							
	1.2.6	Urusan Inspektorat		83	Orang	415.000.000							

	1.2.6.1	Manajemen Pengawasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang manajemen pengawasan pemerintahan	8	Orang	40.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Pejabat Struktural Ess. III dan Auditor Madya		8			Inspektorat
	1.2.6.2	Diklat Audit Investigasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit investigasi	7	Orang	35.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		7			Inspektorat
	1.2.6.3	Diklat Pengawasan Intern Berbasis Resiko	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan intern berbasis risiko	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			1		Inspektorat
	1.2.6.4	Diklat Probity Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang probity audit	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		3			Inspektorat
	1.2.6.5	Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit	Jumlah pegawai yang mampu menulis laporan hasil audit	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			2		Inspektorat
	1.2.6.6	Diklat Audit Kinerja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit kinerja	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			2		Inspektorat
	1.2.6.7	Diklat Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit PAD	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			2		Inspektorat
	1.2.6.8	Diklat Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penilaian angka kredit JF auditor	2	Orang	10.000.000		Pejabat Struktural Ess. IV dan Pejabat Fungsional Auditor				2	Inspektorat
	1.2.6.9	Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang audit berbantuan komputer	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor				1	Inspektorat
	1.2.6.10	Diklat Audit Keuangan Desa (Siswakeudes)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit keuangan desa	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat
	1.2.6.11	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian maturitas SPIP	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		3			Inspektorat
	1.2.6.12	Diklat Tata Cara Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi reviu RKA	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		4			Inspektorat
	1.2.6.13	Diklat Asesor Pemerintahan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang asesor pemerintahan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
	1.2.6.14	Diklat Penyusunan dan Penilaian AK P2UPD	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyusunan dan penilaian angka kredit P2UPD	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
	1.2.6.15	Diklat Pengawasan Tujuan Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan tujuan tertentu	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD				1	Inspektorat
	1.2.6.16	Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
	1.2.6.17	Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penyusunan kertas kerja audit	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor				1	Inspektorat

		1.2.6.18	Diklat Penjenjangan Madya	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			2		Inspektorat
		1.2.6.19	Diklat Penjenjangan Muda	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			1		Inspektorat
		1.2.6.20	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang auditor ahli	3	Orang	15.000.000		Fungsional Umum			3		Inspektorat
		1.2.6.21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang menguasai pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ BPKP	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Fungsional Umum		30			Inspektorat
		1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum		3	Orang	15.000.000							Badan Kesbangpol
		1.3.1	Urusan Kesbangpol		3	Orang	15.000.000							Badan Kesbangpol
		1.3.1.1	Diklat Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang memahami tentang wawasan kebangsaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Kesbangpol
		1.3.1.2	Diklat Ketahanan Nasional	Jumlah peserta yang memiliki kompetensi di bidang ketahanan nasional	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Kesbangpol
		1.3.1.3	Diklat Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta yang mampu memahami mekanisme penanganan konflik sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Kesbangpol
		II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		439	Orang	4.001.105.000							Seluruh Perangkat Daerah
		2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.		439	Orang	4.001.105.000							Seluruh Perangkat Daerah
		2.1.1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN		439	Orang	4.001.105.000							Seluruh Perangkat Daerah
		2.1.1.1	Diklat Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	25	Orang	175.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota DPRD		25			Sekretariat DPRD
		2.1.1.2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi manajerial tingkat II	5	Orang	151.305.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ LAN	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		5			BKPSDM
		2.1.1.3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Jumlah pejabat administrator yang memiliki kompetensi manajerial tingkat III	20	Orang	442.500.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ BPSPDM Provinsi Sulsel/ LAN	Pejabat Administrator		20			BKPSDM

		2.1.1.4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Jumlah pejabat pengawas yang memiliki kompetensi manajerial tingkat IV	30	Orang	606.900.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ BPSPDM Provinsi Sulsel/ LAN	Pejabat Pengawas		30			BKPSDM
		2.1.1.5	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Camat dan Lurah	Jumlah Camat dan Lurah yang memiliki kompetensi manajerial dibidang pemerintahan	18	Orang	126.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Camat dan Lurah			18		BKPSDM
		2.1.1.6	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang memiliki kemampuan manajerial dibidang pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Kepala Desa		30	30	27	Dinas PMD
		2.1.1.7	Diklat Pembekalan Aparat Perangkat Desa	Jumlah aparat desa yang memiliki kemampuan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Aparat Desa		30	30	27	Dinas PMD
		2.1.1.8	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah calon PNS yang memiliki kompetensi dibidang kepegawaian	120	Orang	1.394.400.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ BPSPDM Provinsi Sulsel/ LAN	CPNS		120			BKPSDM
		2.1.1.9	Diklat Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
		2.1.1.10	Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (POL-PP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi polisi pamong praja	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Pol PP			10		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		2.1.1.11	Diklat Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemadam kebakaran	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar			10		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		2.1.1.12	Diklat Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis kebakaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar		1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		2.1.1.13	Diklat Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis standardisasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional		1			Dinas Perindag KUM
		2.1.1.14	Diklat Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis administrator database	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.1.1.15	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis auditor	4	Orang	20.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSPDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Staf Pelaksana/ Fungsional Auditor			4		Inspektorat
		2.1.1.16	Diklat Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis SDM	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		10			BKPSDM
		2.1.1.17	Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengawas ketenagakerjaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ Pusdiklat Kemnaker	Staf Pelaksana/ Pengawas Ketenagakerjaan				1	Dinas PMPTSPTK

		2.1.1.18	Diklat Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM/ LKPP	Staf Pelaksana			4		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		2.1.1.19	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Diklat	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis diklat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		2.1.1.20	Diklat Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis perencana	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbindiklatren Bappenas	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
			JUMLAH		1433	Orang	9.962.105.000							



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI

Benteng, 11 Juni 2021

WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. SAIFUL ARIF, S.H.

**Tabel 4.1.2. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan Kompetensi setiap triwulan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV	
					Volume	Satuan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Seluruh Sektor Pemerintahan	A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1231	Orang	8.789.455.000							Seluruh Perangkat Daerah
		I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		812	Orang	5.174.000.000							Seluruh Perangkat Daerah
		1.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren		745	Orang	3.945.000.000							Seluruh Perangkat Daerah
		1.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		310	Orang	1.770.000.000							
		1.1.1.1	Urusan Pendidikan		135	Orang	825.000.000							
		1.1.1.1.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pendidikan	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.2	Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing dan mendidik dengan baik	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru SD dan SMP		30			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.3	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD	Jumlah PAUD yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing, mendidik dan membina dengan baik	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Guru PAUD		11			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.4	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki Kepala Sekolah yang bersertifikat dan mampu melakukan manajemen sekolah	30	Orang	300.000.000	BKPSDM	Guru / Kepala Sekolah			30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.5	Diklat Penyusunan Kurikulum dan Silabus	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kurikulum dan silabus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

		1.1.1.1.6	Diklat Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu mengembangkan teknologi pembelajaran bagi TK, SD, dan SMP	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru		30			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.7	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran serta dapat membangun minat belajar murid/siswa	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru		30			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pelatih cabang olahraga tertentu	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.2	Urusan Kesehatan		49	Orang	245.000.000							
		1.1.1.2.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Kesehatan	Jumlah pegawai perencanaan yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.2	Diklat Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			12		Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.3	Diklat Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitator pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.4	Diklat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu melakukan pelayanan kesehatan prima	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.5	Diklat Higiene, Sanitasi Makanan dan Minuman	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu menerapkan higiene, sanitasi makanan dan minuman	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				12	Dinas Kesehatan
		1.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		14	Orang	100.000.000							
		1.1.1.3.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Jumlah pegawai perencanaan yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas PUPR
		1.1.1.3.2	Diklat Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.3	Diklat Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.4	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR

		1.1.1.3.5	Diklat Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu memelihara jalan dan jembatan secara berkelanjutan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.6	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara irigasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.7	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara sungai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.8	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Rawa	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara rawa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.9	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Pantai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara pantai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.10	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang ramah lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.11	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.12	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PUPR
		1.1.1.3.13	Diklat Pengelolaan Data Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola data pengadaan barang dan jasa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas PUPR
		1.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3	Orang	15.000.000							
		1.1.1.4.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.2	Diklat Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai yang mampu menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyehatan Lingkungan Perumahan	Jumlah pelatih pelatihan penyehatan lingkungan perumahan bagi Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		77	Orang	415.000.000							
		1.1.1.5.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.2	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis dasar kepamongprajaan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		30			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

	1.1.1.5.3	Diklat Pemadam Kebakaran	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi teknis di bidang pemadam kebakaran	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran		30			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.4	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi PNS yang melakukan pelanggaran hukum	2	Orang	40.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Satpol PP/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)		2			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.5	Diklat Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu menegakkan Peraturan Daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.6	Diklat Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang memiliki anggota Satpol PP yang mampu menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		11			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.7	Diklat Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam penanganan bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran		1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.5.8	Diklat Training of Trainers (TO) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran		1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	1.1.1.6	Urusan Sosial		27	Orang	135.000.000							
	1.1.1.6.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Sosial	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Sosial
	1.1.1.6.2	Diklat Perencana Sosial	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
	1.1.1.6.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Sosial	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan sosial pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
	1.1.1.6.4	Diklat Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Sosial
	1.1.1.6.5	Pengelolaan Sistem Informasi Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sistem informasi fakir miskin	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
	1.1.1.6.6	Diklat Pendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki petugas pendata PMKS/PSKS	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Sosial
	1.1.1.6.7	Diklat Pengelolaan Data PMKS/PSKS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola data PMKS/PSKS secara efektif	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Sosial
	1.1.1.7	Urusan Penanggulangan Bencana		5	Orang	35.000.000							
	1.1.1.7.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

		1.1.1.7.2	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.3	Diklat Rencana Kontingensi	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana tanggap darurat kebencanaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.4	Diklat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melakukan penanganan darurat bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.5	Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Jumlah pegawai yang mampu mengkaji kerugian dan kebutuhan pasca bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.2	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar		267	Orang	1.335.000.000							
		1.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja		17	Orang	85.000.000							
		1.1.2.1.1	Diklat Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.2	Diklat Training of Taining (TOT) Pelatihan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Tenaga Kerja	Jumlah pelatih pelatihan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.3	Diklat Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.4	Diklat Pendataan dan Pengelolaan Data Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu mendata dan mengolah data tenaga kerja pada setiap Kecamatan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah pelatih pelatihan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.6	Diklat Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan tugas perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.7	Diklat Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi pasar kerja (bursa kerja) daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		21	Orang	105.000.000							
		1.1.2.2.1	Training of Trainers (TOT) Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah fasilitator bimtek pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.2	Diklat Pengarusutamaan Gender	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengarusutamaan gender	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.3	Diklat Sistem Data Terpilah, Statistik Gender dan Anak	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sistem data terpilah, statistik gender dan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB

	1.1.2.2.4	Diklat Pelayanan Perlindungan Anak	Jumlah petugas pelayanan perlindungan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.5	Diklat Aksi Afirmasi Perlindungan Anak	Jumlah pegawai yang mampu melakukan aksi afirmasi perlindungan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.6	Diklat Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Gender	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1			Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.7	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.9	Diklat Fasilitasi Keberlangsungan Ber-KB	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu memfasilitasi keberlangsungan ber-KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelatih pelatihan kesehatan reproduksi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.2.11	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan KB	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas P3AP2KB
	1.1.2.3	Urusan Pertanian (Pangan)		27	Orang	135.000.000							
	1.1.2.3.1	Diklat Pendataan Hasil Pertanian	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu mendata hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.2	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan	Jumlah pelatih pelatihan pengembangan produk olahan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal	Jumlah pelatih pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku lokal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.4	Diklat Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitator yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.5	Diklat Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.6	Diklat Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan manajemen ketahanan pangan dan gizi berbasis kemandirian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.7	Diklat Pengawasan Keamanan Makanan Segar	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas pengawasan keamanan makanan segar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.4	Urusan Lingkungan Hidup		22	Orang	110.000.000							

	1.1.2.4.1	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelatih pelatihan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.2	Diklat Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Kelembagaan Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat secara efektif	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.3	Diklat Manajemen dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Sampah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sampah berdasarkan 3R	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.4	Diklat Pengelolaan Air dan Limbah Cair	Jumlah pegawai yang mampu mengelola air dan limbah cair	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.5	Diklat Audit, Efisiensi dan Konservasi Air	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis audit, efisiensi dan konservasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.6	Diklat Sistem Manajemen Energi (ISO 50001: 2011)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen energi yang berstandar ISO 50001:2018	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.7	Diklat Audit Lingkungan untuk Sertifikasi Lingkungan	Jumlah pegawai yang mampu mengaudit dan menjamin kesehatan lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.8	Diklat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen lingkungan yang berstandar ISO 14001:2015	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.9	Diklat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001:2007)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berstandar OHSAS 18001:2007	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.10	Diklat Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola bahan beracun dan berbahaya (limbah B3)	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.11	Diklat Pengelolaan Limbah Domestik (Sewage Treatment Plant)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola limbah domestik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.12	Diklat Sistem Manajemen Laboratorium (ISO/IEC 17025:2005)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen laboratorium yang berstandar ISO/IEC 17025:2005	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.5	Urusan Kependudukan dan Capil		15	Orang	75.000.000							
	1.1.2.5.1	Diklat Teknis Pemeliharaan Perangkat Keras SIAK	Jumlah petugas SIAK yang mampu memelihara perangkat keras SIAK secara berkelanjutan	3	Orang	15.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		3			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.1.2.5.2	Diklat Training of Trainers (TOT) Petugas Registrasi Kependudukan Desa/ Kelurahan	Jumlah pelatih pelatihan bagi petugas registrasi kependudukan Desa/ Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.1.2.5.3	Diklat Teknis Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah petugas dengan kompetensi teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Tenaga Fungsional			11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		1.1.2.6	Ururan Masyarakat dan Desa		74	Orang	370.000.000						
		1.1.2.6.1	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11		Dinas PMD
		1.1.2.6.2	Diklat Pembangunan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pembangunan masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11		Dinas PMD
		1.1.2.6.3	Diklat Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11	Dinas PMD
		1.1.2.6.4	Diklat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11		Dinas PMD
		1.1.2.6.5	Diklat Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pembangunan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1		Dinas PMD
		1.1.2.6.6	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatih pelatihan pengelolaan keuangan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1	Dinas PMD
		1.1.2.6.7	Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola badan usaha milik desa (BUMDes)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11		Dinas PMD
		1.1.2.6.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelatih pelatihan administrasi pemerintahan desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1	Dinas PMD
		1.1.2.6.9	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan produk hukum desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1	Dinas PMD
		1.1.2.6.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1	Dinas PMD
		1.1.2.6.11	Diklat Pendataan Potensi Penduduk	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan potensi penduduk dengan akurat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11		Dinas PMD
		1.1.2.6.12	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan standar pelayanan minimal desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1	Dinas PMD
		1.1.2.6.14	Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Desa	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sistem keuangan desa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Pelaksana			2	Dinas PMD
		1.1.2.7	Ururan Perhubungan		6	Orang	30.000.000						
		1.1.2.7.1	Diklat Pengelola Terminal Bus	Jumlah pegawai yang mampu mengelola terminal bus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf UPT Terminal			1	Dinas Perhubungan
		1.1.2.7.2	Diklat Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.2.7.3	Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Usaha Angkutan Laut, Sungai dan Danau serta Pelayaran Rakyat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun SOP perizinan usaha ASDP dan pelayaran rakyat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.2.7.4	Diklat Pengelolaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		3		Dinas Perhubungan

		1.1.2.8	Urusan Komunikasi dan Informatika		16	Orang	80.000.000						
		1.1.2.8.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.2	Diklat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis mengelola informasi dan komunikasi publik Pemda	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.3	Diklat Pengelolaan e-Government Daerah Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berbasis e-government	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.4	Diklat Jaringan Komputer dan Sistem Layanan Administrasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis membangun jaringan komputer dan sistem layanan administrasi berbasis IT	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.5	Diklat Sub Bidang Jasa Multimedia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jasa multimedia	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.6	Diklat Kehumasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang kehumasan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.7	Diklat Jaringan Telekomunikasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jaringan telekomunikasi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.8	Diklat Keahlian Grafis	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan dan mendesain data dan informasi dalam bentuk grafis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.9	Diklat Manajemen Layanan TI	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya teknologi informasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.10	Diklat Pengembangan Pembuatan (Development) TI	Jumlah pegawai yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi informasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.11	Diklat Pemeliharaan (Maintenance) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memelihara perangkat komputer secara berkala	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.8.12	Diklat Piranti Lunak (Software) dan Keras (Hardware) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memperbaiki piranti lunak dan keras komputer secara berkala	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.9	Urusan Koperasi dan UKM		13	Orang	65.000.000						
		1.1.2.9.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	2			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.2	Diklat Perkoperasian	Jumlah pegawai yang mampu membina koperasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.3	Diklat Kewirausahaan	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi peningkatan kewirausahaan di desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.4	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Keterampilan Teknis Koperasi dan UMKM	Jumlah pelatih pelatihan keterampilan teknis koperasi dan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelola Koperasi	Jumlah pelatih pelatihan pengelola koperasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perindag KUM

		1.1.2.9.6	Diklat Pengembangan Lembaga UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan lembaga UMKM	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.7	Diklat Pengembangan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi koperasi dan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.8	Diklat Perkoperasian Berbasis Syariah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan perkoperasian berbasis syariah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.9	Diklat Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi dan membina koperasi simpan pinjam	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.9.10	Diklat Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pengembangan industri kecil dan menengah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
		1.1.2.10	Urusan Penanaman Modal		29	Orang	145.000.000							
		1.1.2.10.1	Diklat Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu menyusun dan mengelola peta potensi investasi daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.2	Diklat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.3	Diklat Pengelolaan Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelaksanaan penanaman modal di daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.4	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal : Substansi OSS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis Online Single Submission (OSS)	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.5	Diklat promosi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu melakukan promosi dibidang penanaman modal	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.6	Diklat Job Instruction Training	Jumlah pegawai yang mampu menyusun job instruction	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.7	Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis penyelenggaraan PTSP secara optimal	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.10.8	Bimtek Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	Jumlah pegawai yang mampu menyelenggarakan PTSP sesuai kualifikasi tertentu	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.11	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		3	Orang	15.000.000							
		1.1.2.11.1	Penerapan NSPK bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.11.2	Diklat Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah pegawai yang mampu membina dan mengembangkan organisasi kepemudaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.11.3	Diklat Training of Training (TOT) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pelatih pelatihan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Disdikpora

		1.1.2.12	Urusan Statistik dan Persandian		7	Orang	35.000.000						
		1.1.2.12.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Statistik dan Persandian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.2	Diklat Pengelolaan Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola statistik sektoral	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.3	Diklat Pemanfaatan Data Ekonomi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan memanfaatkan data statistik ekonomi daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.4	Diklat Teknis Dasar-dasar Keamanan Jaringan dan Teknologi Informasi (Fundamental Network Security)	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan melindungi sistem jaringan dari serangan cyber	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	2			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.5	Diklat Teknis Kriptografi Simetrik, Asimetrik dan Steganografi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang simetrik, asimetrik dan steganografi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.6	Diklat Teknis Pengelolaan Database Persandian	Jumlah pegawai yang mampu mengelola database persandian daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.13	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan		17	Orang	85.000.000						
		1.1.2.13.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.2	Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Tenaga Pustakawan		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.3	Diklat Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi masyarakat desa dan sekolah untuk meningkatkan minat dan gemar membaca	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.4	Diklat Manajemen Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.5	Diklat Pengembangan Perpustakaan (Berbasis Komputer)	Jumlah pegawai yang mampu membangun sistem perpustakaan elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.6	Diklat Pemeliharaan Koleksi	Jumlah pegawai yang mampu memelihara koleksi perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.7	Diklat Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Jumlah pegawai yang mampu mengelola arsip statis dan dinamis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan		168	Orang	840.000.000						
		1.1.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan		15	Orang	75.000.000						
		1.1.3.1.1	Bimtek Training of trainers (TOT) Pelatihan Budidaya Rumput Laut	Jumlah Kecamatan yang memiliki pelatih pelatihan budidaya rumput laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Bidang Perikanan Budidaya			1	Dinas Perikanan
		1.1.3.1.2	Magang Juru Lelang komoditas laut	Jumlah Desa pesisir yang memiliki juru Lelang komoditas laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1	Dinas Perikanan

	1.1.3.1.3	Bimtek Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina mutu dan keamanan hasil perikanan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.4	Bimtek Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek manajemen pengendalian hama dan penyakit ikan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.5	Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.6	Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.7	Bimtek Training of trainers (TOT) Pengolahan komoditas laut (Panen dan Pasca Panen)	Jumlah Desa dengan petugas pemberdayaan nelayan yang memiliki kompetensi teknis bidang pengolahan budidaya laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		1			Dinas Perikanan
	1.1.3.1.8	Bimtek Bagi Petugas Pembina Pengelolaan Pemberian Pakan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina pengelolaan pemberian pakan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.9	Bimtek Bagi Petugas Pembina Teknik Pembuatan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina teknik pembuatan alat tangkap ikan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			2		Dinas Perikanan
	1.1.3.1.10	Bimtek Training of trainers (TOT) Pelatihan Budidaya Ikan Karang Bernilai Ekonomis Tinggi	Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimtek budidaya ikan karang bernilai ekonomis tinggi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		1			Dinas Perikanan
	1.1.3.2	Urusan Pariwisata dan Kebudayaan		33	Orang	165.000.000							
	1.1.3.2.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.2	Diklat Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola obyek dan daya tarik wisata (ODTW) daerah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.3	Diklat Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengidentifikasi dan mengelola kawasan strategis pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.4	Diklat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.5	Diklat Pemasaran Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata baik domestik dan mancanegara	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.6	Diklat Kantor Depan (Front Office)	Jumlah pegawai yang mampu melayani wisatawan secara prima	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.7	Diklat Agen Perjalanan (Travel Agencies)	Jumlah pegawai yang mampu mendesain dan mengelola paket perjalanan wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	1.1.3.2.8	Diklat Pemandu Wisata	Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang memiliki petugas pemandu wisata yang memiliki kompetensi teknis	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			4		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		1.1.3.2.9	Diklat Pengembangan Wisata Religi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan obyek dan daya tarik wisata religi	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.10	Diklat Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu membangun kemitraan pengembangan dan promosi wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.11	Diklat Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya pariwisata berbasis masyarakat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.12	Diklat Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola kesenian daerah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.3	Urusan Pertanian (selain pangan) dan Peternakan		61	Orang	305.000.000							
		1.1.3.3.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pertanian dan Peternakan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.2	Diklat Pengawasan dan Pembinaan	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Juru Sembelih Halal	Jumlah pelatih pelatihan juru sembelih halal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.4	Diklat Produksi Benih Tanaman	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang produksi benih tanaman	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf UPTD Pembenihan		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.5	Diklat Fasilitator Tanaman Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator tanaman organik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.6	Diklat Fasilitator Ternak Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator ternak organik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.7	Diklat Teknologi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan teknologi pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.8	Diklat Komoditi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan komoditi pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.9	Diklat Budidaya Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan budidaya pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.10	Diklat Agrobisnis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang agrobisnis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.11	Diklat Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP)	Jumlah penyuluh yang memperoleh pengetahuan baru	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Penyuluh Pertanian		30			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.12	Diklat Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengawas benih tanaman	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.4	Urusan Energi Baru Terbarukan		6	Orang	30.000.000							

	1.1.3.4.1	Diklat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Bagi Operator dan/atau Pengelola	Jumlah operator/ pengelola yang mampu mengusahakan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.4.2	Diklat Teknis Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengelolaan PLTS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.4.3	Diklat Teknis Perencanaan dan Pembangunan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan pembangunan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.4.4	Diklat Teknis Pemasangan dan Pemeliharaan Solar Home Sistem (SHS)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemasangan dan pemeliharaan peralatan SHS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.4.5	Diklat Teknis Evaluasi Perencanaan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu mengevaluasi perencanaan pembangunan PLTS terpusat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.4.6	Diklat Teknis Uji Laik Operasi PLTS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengujian kelayakan operasi PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan
	1.1.3.5	Urusan Perdagangan		4	Orang	20.000.000							
	1.1.3.5.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perindag KUM
	1.1.3.5.2	Diklat Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pasar rakyat dan mengurus perizinan toko swalayan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.5.3	Diklat Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin bidang Perdagangan	Jumlah Pegawai yang mampu memahami dan menerapkan SOP perizinan dagang	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
	1.1.3.5.4	Diklat Pengelolaan Sarana Industri Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pemanfaatan sarana industri dagang	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6	Urusan Perindustrian		49	Orang	245.000.000							
	1.1.3.6.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perindustrian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.2	Diklat Perencanaan Pengembangan Industri Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengembangan industri daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.3	Diklat Teknik Pembuatan Produk Kerajinan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pembuatan produk kerajinan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.4	Diklat Fasilitator Good Manufacturing Practices (GMP)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator GMP	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.5	Diklat Desain Produk Industri dan Kemasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mendesain produk industri dan kemasan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.6	Diklat Penguji Mutu Barang	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penguji mutu barang	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.7	Diklat Manajemen Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajemen industri	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM
	1.1.3.6.8	Diklat Penyuluh Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyuluh industri	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM

		1.1.3.6.9	Diklat Desain Grafis dan Advertising	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi desain grafis dan periklanan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Produksi Olahan Ikan dan Daging	Jumlah pelatih pelatihan produksi olahan ikan dan daging	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.11	Diklat Training of Trainers (TOT) Produksi Kerajinan Bambu dan Kayu	Jumlah pelatih pelatihan produksi olahan ikan dan daging	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.12	Diklat Teknik Penyusunan Perencanaan Bisnis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis menyusun perencanaan bisnis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.13	Diklat Strategi Promosi dan Penjualan Melalui Internet	Jumlah pegawai yang mampu menyusun strategi promosi dan penjualan berbasis elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.14	Diklat Manajemen Keuangan UMKM	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial dibidang keuangan UMKM	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.15	Diklat Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar	Jumlah pegawai yang mampu mengelola usaha perdagangan pasar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.16	Diklat Manajemen Bisnis untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial bisnis dibidang PKL	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.2	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi penyelenggara perangkat daerah penunjang		64	Orang	1.214.000.000							
		1.2.1	Urusan Bappelitbangda		14	Orang	126.000.000							
		1.2.1.1	Diklat Penyusunan RPJMD	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RPJMD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.2	Diklat Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun Renstra PD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.3	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana kerja pemerintah daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.4	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RKPD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.5	Diklat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.6	Diklat Reviu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mereviu RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD	4	Orang	36.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.2	Urusan BPKPAD		16	Orang	96.000.000							
		1.2.2.1	Diklat Penganggaran Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BPKPAD
		1.2.2.2	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang perbendaharaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BPKPAD

	1.2.2.3	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPAD
	1.2.2.4	Diklat Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPAD
	1.2.2.5	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan barang milik daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPAD
	1.2.2.6	Diklat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPAD
	1.2.2.7	Diklat Penilaian Aset	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian aset	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		BKPAD
	1.2.2.8	Bimtek Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman dibidang keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan bendahara			2		BKPAD
	1.2.3	Urusan BKPSDM		34	Orang	204.000.000							
	1.2.3.1	Diklat Manajemen Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman ruang lingkup manajemen PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
	1.2.3.2	Diklat Komunikasi Efektif	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman tentang komunikasi efektif	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.3	Bimtek Persiapan Pensiun (Purna Bhakti) PNS	Jumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun yang mengikuti bimbingan purna bhakti	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Pegawai yang memasuki masa pensiun		2			BKPSDM
	1.2.3.4	Diklat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu mengelola administrasi kepegawaian	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.5	Diklat Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kebutuhan formasi dan pengadaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.6	Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SKP	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.7	Diklat Penilaian Kinerja PNS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian kinerja PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.8	Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah pegawai yang mampu menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
	1.2.3.9	Diklat Manajemen Talenta	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen talenta	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.10	Diklat Pengembangan dan Pola Karir PNS	Jumlah pegawai yang mampu menyusun pola dan pengembangan karir PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
	1.2.3.11	Diklat Penegakan Disiplin PNS	Jumlah pegawai yang mampu memahami ruang lingkup penegakan disiplin PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM

		1.2.3.12	Diklat Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola promosi dan mutasi PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.13	Diklat Kepangkatan PNS	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup kepangkatan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.14	Bimtek Tata Cara Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang tata cara pemberian penghargaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.15	Bimtek Perlindungan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang perlindungan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
			Urusan Pendukung Pemerintahan		17	Orang	393.000.000							
		1.2.4	Urusan Sekretariat Daerah		17	Orang	93.000.000							
		1.2.4.1	Diklat Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menyusun Perda dan Perkada	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.2	Diklat Penanganan Perkara	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menangani perkara di lingkup pemerintah daerah	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.3	Diklat Sistem Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi merencanakan dan membangun JDIH pemerintah daerah	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.4	Diklat Advokasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang advokasi hukum	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.5	Diklat Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah pegawai yang mampu menyusun anjab dan abk	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bagian Organisasi
		1.2.4.6	Diklat Pengembangan Organisasi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan kebutuhan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Organisasi
		1.2.4.7	Diklat Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah pegawai yang mampu menyusun evjab	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Organisasi
		1.2.4.8	Diklat Manajemen Perkantoran Modern	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen perkantoran modern	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
		1.2.4.9	Diklat Menyusun Telaahan Staf dan Paripurna	Jumlah pegawai yang mampu menyusun telaahan staf dan paripurna	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
		1.2.4.10	Bimtek Tata Cara Penyusunan SOP	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SOP	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.11	Diklat Tata Naskah Dinas/ Elektronik	Jumlah pegawai yang mampu menguasai tata naskah dinas dan tata naskah elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.12	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		1.2.4.13	Bimtek Tata Cara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol

	1.2.4.14	Diklat Penataan Ruang Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.15	Diklat Penataan Lingkungan Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan lingkungan kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
	1.2.4.16	Diklat Keprotokolan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang keprotokolan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
	1.2.5	Urusan Sekretariat DPRD		35	Orang	300.000.000							
	1.2.5.1	Bimtek Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	25	Orang	250.000.000	BKPSDM	Anggota DPRD			25		Sekretariat DPRD
	1.2.5.2	Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	10	Orang	50.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				10	Sekretariat DPRD
		Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		79	Orang	395.000.000							
	1.2.6	Urusan Inspektorat		79	Orang	395.000.000							
	1.2.6.1	Manajemen Pengawasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang manajemen pengawasan pemerintahan	4	Orang	20.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSPDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Pejabat Struktural Ess. III dan Auditor Madya		4			Inspektorat
	1.2.6.2	Diklat Audit Investigasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit investigasi	7	Orang	35.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		7			Inspektorat
	1.2.6.3	Diklat Pengawasan Intern Berbasis Resiko	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan intern berbasis risiko	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			1		Inspektorat
	1.2.6.4	Diklat Probyity Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang probity audit	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			3		Inspektorat
	1.2.6.5	Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit	Jumlah pegawai yang mampu menulis laporan hasil audit	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			2		Inspektorat
	1.2.6.6	Diklat Audit Kinerja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit kinerja	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		2			Inspektorat
	1.2.6.7	Diklat Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit PAD	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			2		Inspektorat
	1.2.6.8	Diklat Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penilaian angka kredit JF auditor	2	Orang	10.000.000		Pejabat Struktural Ess. IV dan Pejabat Fungsional Auditor				2	Inspektorat
	1.2.6.9	Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang audit berbantuan komputer	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor				1	Inspektorat
	1.2.6.10	Diklat Audit Keuangan Desa (Siswakeudes)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit keuangan desa	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat

		1.2.6.11	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian maturitas SPIP	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		3			Inspektorat
		1.2.6.12	Diklat Tata Cara Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi reviu RKA	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat
		1.2.6.13	Diklat Asesor Pemerintahan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang asesor pemerintahan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD				1	Inspektorat
		1.2.6.14	Diklat Penyusunan dan Penilaian AK P2UPD	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyusunan dan penilaian angka kredit P2UPD	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD				1	Inspektorat
		1.2.6.15	Diklat Pengawasan Tujuan Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan tujuan tertentu	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD				1	Inspektorat
		1.2.6.16	Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD		1			Inspektorat
		1.2.6.17	Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penyusunan kertas kerja audit	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat
		1.2.6.18	Diklat Penjenjangan Madya	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			2		Inspektorat
		1.2.6.19	Diklat Penjenjangan Muda	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			1		Inspektorat
		1.2.6.20	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang auditor ahli	3	Orang	15.000.000		Fungsional Umum			3		Inspektorat
		1.2.6.21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang menguasai pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri/ BPKP	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Fungsional Umum			30		Inspektorat
		1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum		3	Orang	15.000.000							
		1.3.1	Urusan Kesbangpol		3	Orang	15.000.000							
		1.3.1.1	Diklat Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang memahami tentang wawasan kebangsaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		1.3.1.2	Diklat Ketahanan Nasional	Jumlah peserta yang memiliki kompetensi di bidang ketahanan nasional	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		1.3.1.3	Diklat Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta yang mampu memahami mekanisme penanganan konflik sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		419	Orang	3.615.455.000							

	2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.		419	Orang	3.615.455.000							
	2.1.1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN		419	Orang	3.615.455.000							
	2.1.1.1	Diklat Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	25	Orang	175.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota DPRD			25		Sekretariat DPRD
	2.1.1.2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi manajerial tingkat II	5	Orang	151.305.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ LAN	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		5			BKPSDM
	2.1.1.3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Jumlah pejabat administrator yang memiliki kompetensi manajerial tingkat III	30	Orang	663.750.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPSDM Provinsi Sulsel/ LAN	Pejabat Administrator		30			BKPSDM
	2.1.1.4	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Camat dan Lurah	Jumlah Camat dan Lurah yang memiliki kompetensi manajerial dibidang pemerintahan	18	Orang	126.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Camat dan Lurah			18		BKPSDM
	2.1.1.5	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang memiliki kemampuan manajerial dibidang pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Kepala Desa		30	30	27	Dinas PMD
	2.1.1.6	Diklat Pembekalan Aparat Perangkat Desa	Jumlah aparat desa yang memiliki kemampuan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Aparat Desa		30	30	27	Dinas PMD
	2.1.1.7	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah calon PNS yang memiliki kompetensi dibidang kepegawaian	120	Orang	1.394.400.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPSDM Provinsi Sulsel/ LAN	CPNS		120			BKPSDM
	2.1.1.8	Diklat Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
	2.1.1.9	Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (POL-PP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi polisi pamong praja	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Pol PP		10			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.10	Diklat Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemadam kebakaran	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar		10			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.11	Diklat Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analis kebakaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar			1		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.12	Diklat Jabatan Fungsional Analis Standardisasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analis standardisasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional			1		Dinas Perindag KUM

	2.1.1.13	Diklat Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis administrator database	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.1.1.14	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis auditor	4	Orang	20.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Staf Pelaksana/ Fungsional Auditor			4		Inspektorat
	2.1.1.15	Diklat Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analis SDM	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		10			BKPSDM
	2.1.1.16	Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengawas ketenagakerjaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ Pusdiklat Kemnaker	Staf Pelaksana/ Pengawas Ketenagakerjaan				1	Dinas PMPTSPTK
	2.1.1.17	Diklat Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM/ LKPP	Staf Pelaksana		4			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	2.1.1.18	Diklat Jabatan Fungsional Analis Diklat	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis diklat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Staf Pelaksana			2		BKPSDM
	2.1.1.19	Diklat Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis perencana	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbindiklatren Bappenas	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
	JUMLAH			1231	Orang	8.789.455.000							

Benteng, 11 Juni 2021



WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. SAIFUL ARIF, S.H.

**Tabel 4.1.3. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

Tujuan	Sasaran	No	Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan							% pencapaian target Pengembangan Kompetensi setiap triwulan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Judul Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	Instansi Penyelenggara	Peserta Pengembangan Kompetensi	I	II	III	IV		
					Volume	Satuan									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Seluruh Sektor Pemerintahan	A	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1250	orang	9.165.105.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		I	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis		811	orang	5.164.000.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		1.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren		744	orang	3.940.000.000							Seluruh Perangkat Daerah	
		1.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		307	orang	1.755.000.000								
		1.1.1.1	Urusan Pendidikan		136	Orang	830.000.000								
		1.1.1.1.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pendidikan	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSPDM Kemendagri	Staf Perencana	1					Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.2	Diklat Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing dan mendidik dengan baik	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)		30				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.3	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD	Jumlah PAUD yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengajar, membimbing, mendidik dan membina dengan baik	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Guru PAUD		11				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.4	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki Kepala Sekolah yang bersertifikat dan mampu melakukan manajemen sekolah	30	Orang	300.000.000	BKPSDM	Guru / Kepala Sekolah		30				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.5	Diklat Penyusunan Kurikulum dan Silabus	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kurikulum dan silabus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.6	Diklat Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu mengembangkan teknologi pembelajaran bagi TK, SD, dan SMP	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru				30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.7	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran	Jumlah sekolah yang memiliki guru yang mampu menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran serta dapat membangun minat belajar murid/siswa	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Guru				30		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1.1.1.1.8	Diklat Pengembangan Kepemudaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pengembang kegiatan kepemudaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan Guru		1				Disdikpora		

		1.1.1.1.9	Diklat Kepramukaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pengembang kegiatan kepramukaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan Guru		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.1.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai pelatih cabang olahraga tertentu	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		1.1.1.2	Urusan Kesehatan		49	Orang	245.000.000							
		1.1.1.2.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Kesehatan	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.2	Diklat Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.3	Diklat Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki fasilitator pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.4	Diklat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu melakukan pelayanan kesehatan prima	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.2.5	Diklat Higiene, Sanitasi Makanan dan Minuman	Jumlah Puskesmas yang memiliki petugas yang mampu menerapkan higiene, sanitasi makanan dan minuman	12	Orang	60.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		12			Dinas Kesehatan
		1.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan		11	Orang	85.000.000							
		1.1.1.3.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1				Dinas PUPR
		1.1.1.3.2	Diklat Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.3	Diklat Pengawasan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.4	Diklat Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah pegawai yang mampu memelihara jalan dan jembatan secara berkelanjutan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.5	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara irigasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.6	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara sungai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.7	Diklat Perencanaan, Operasi dan Pemeliharaan Pantai	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan, mengoperasikan dan memelihara pantai	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas PUPR
		1.1.1.3.8	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang ramah lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PUPR

		1.1.1.3.9	Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang sehat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	1			Dinas PUPR
		1.1.1.3.10	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2		Dinas PUPR
		1.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3	Orang	15.000.000						
		1.1.1.4.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.2	Diklat Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah pegawai yang mampu menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.4.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyehatan Lingkungan Perumahan	Jumlah pelatih pelatihan penyehatan lingkungan perumahan bagi Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana	1			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.1.1.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		76	Orang	410.000.000						
		1.1.1.5.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.2	Diklat Dasar Polisi Pamong Praja	Jumlah aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi teknis dasar kepomongprajaan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP	30			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.3	Diklat Pemadam Kebakaran	Jumlah aparat pemadam kebakaran yang memiliki kompetensi teknis di bidang pemadam kebakaran	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran	30			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.4	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan bagi PNS yang melakukan pelanggaran hukum	2	Orang	40.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP/ Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.5	Diklat Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang mampu menegakkan Peraturan Daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		1		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.6	Diklat Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang memiliki anggota Satpol PP yang mampu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Satpol PP		11		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.5.7	Diklat Training of Trainers (TO) Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota Pemadam Kebakaran	1			Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
		1.1.1.6	Urusan Sosial		27	Orang	135.000.000						
		1.1.1.6.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Sosial	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Perencana	1			Dinas Sosial

		1.1.1.6.2	Diklat Perencana Sosial	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun perencanaan sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
		1.1.1.6.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Sosial	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan sosial pada Desa/Kelurahan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
		1.1.1.6.4	Diklat Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Sosial
		1.1.1.6.5	Pengelolaan Sistem Informasi Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sistem informasi fakir miskin	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Sosial
		1.1.1.6.6	Diklat Pendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki petugas pendata PMKS/PSKS	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Sosial
		1.1.1.6.7	Diklat Pengelolaan Data PMKS/PSKS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola data PMKS/PSKS secara efektif	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Sosial
		1.1.1.7	Urusan Penanggulangan Bencana		5	Orang	35.000.000							
		1.1.1.7.1	Diklat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Urusan Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai perencana yang mampu menerapkan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran	1	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSPM Kemendagri	Staf Perencana	1				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.2	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.3	Diklat Rencana Kontingensi	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana tanggap darurat kebencanaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.4	Diklat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah pegawai yang mampu melakukan penanganan darurat bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.1.7.5	Diklat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Jumlah pegawai yang mampu mengkaji kerugian dan kebutuhan pasca bencana	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1.2	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar		275	Orang	1.375.000.000							
		1.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja		17	Orang	85.000.000							
		1.1.2.1.1	Diklat Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.2	Diklat Training of Taining (TOT) Pelatihan Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Tenaga Kerja	Jumlah pelatih pelatihan perluasan dan pengembangan kesempatan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.3	Diklat Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
		1.1.2.1.4	Diklat Pendataan dan Pengelolaan Data Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu mendata dan mengolah data tenaga kerja pada setiap Kecamatan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas PMPTSPTK

		1.1.2.1.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah pelatih pelatihan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas PMPTSPK
		1.1.2.1.6	Diklat Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan tugas perlindungan tenaga kerja	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas PMPTSPK
		1.1.2.1.7	Diklat Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mampu mengelola informasi pasar kerja (bursa kerja) daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas PMPTSPK
		1.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB		18	Orang	90.000.000						
		1.1.2.2.1	Training of Trainers (TOT) Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah fasilitator bimtek pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.2	Diklat Pengarusutamaan Gender	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengarusutamaan gender di bidang infrastruktur	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.3	Diklat Pelayanan Perlindungan Anak	Jumlah petugas pelayanan perlindungan anak	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.4	Diklat Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Gender	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Perencana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.6	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.7	Diklat Fasilitasi Keberlangsungan Ber-KB	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu memfasilitasi keberlangsungan ber-KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.2.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan KB	Jumlah pelatih pelatihan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan KB	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas P3AP2KB
		1.1.2.3	Urusan Pertanian (Pangan)		27	Orang	135.000.000						
		1.1.2.3.1	Diklat Pendataan Hasil Pertanian	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas yang mampu mendata hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.2	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengembangan Produk Olahan Pangan	Jumlah pelatih pelatihan pengembangan produk olahan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Diversifikasi Pangan Berbahan Baku Lokal	Jumlah pelatih pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku lokal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2.3.4	Diklat Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitator yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	1.1.2.3.5	Diklat Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.6	Diklat Manajemen Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Kemandirian	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan manajemen ketahanan pangan dan gizi berbasis kemandirian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.3.7	Diklat Pengawasan Keamanan Makanan Segar	Jumlah kecamatan yang memiliki petugas pengawasan keamanan makanan segar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.1.2.4	Urusan Lingkungan Hidup		22	Orang	110.000.000							
	1.1.2.4.1	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pelatih pelatihan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.2	Diklat Penyuluhan Lingkungan Hidup bagi Kelembagaan Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat secara efektif	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.3	Diklat Manajemen dan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Sampah	Jumlah pegawai yang mampu mengolah sampah berdasarkan 3R	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.4	Diklat Pengelolaan Air dan Limbah Cair	Jumlah pegawai yang mampu mengelola air dan limbah cair	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.5	Diklat Audit, Efisiensi dan Konservasi Air	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis audit, efisiensi dan konservasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.6	Diklat Sistem Manajemen Energi (ISO 50001: 2011)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen energi yang berstandar ISO 50001:2018	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.7	Diklat Audit Lingkungan untuk Sertifikasi Lingkungan	Jumlah pegawai yang mampu mengaudit dan menjamin kesehatan lingkungan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.8	Diklat Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen lingkungan yang berstandar ISO 14001:2015	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.9	Diklat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHSAS 18001:2007)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berstandar OHSAS 18001:2007	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.10	Diklat Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola bahan beracun dan berbahaya (limbah B3)	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.11	Diklat Pengelolaan Limbah Domestik (Sewage Treatment Plant)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola limbah domestik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.4.12	Diklat Sistem Manajemen Laboratorium (ISO/IEC 17025:2005)	Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi sistem manajemen laboratorium yang berstandar ISO/IEC 17025:2005	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Lingkungan Hidup
	1.1.2.5	Urusan Kependudukan dan Cakil		14	Orang	70.000.000							
	1.1.2.5.1	Diklat Teknis Penerapan SIAK	Jumlah petugas SIAK yang mampu menjalankan SIAK	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Tenaga Fungsional		2			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		1.1.2.5.2	Diklat Teknis Rekayasa Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Jumlah petugas dengan kompetensi teknis rekayasa data dan inovasi pelayanan kependudukan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Tenaga Fungsional		1			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.5.3	Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah petugas dengan kompetensi teknis pelayanan pencatatan sipil	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Tenaga Fungsional		11			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1.2.6	Urusan Masyarakat dan Desa		93	Orang	465.000.000							
		1.1.2.6.1	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat desa	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11		Dinas PMD
		1.1.2.6.2	Diklat Pembangunan Masyarakat Desa	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11		Dinas PMD
		1.1.2.6.3	Diklat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		11			Dinas PMD
		1.1.2.6.4	Diklat Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pembangunan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
		1.1.2.6.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatih pelatihan pengelolaan keuangan Desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas PMD
		1.1.2.6.6	Diklat Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah pegawai yang mampu mengelola badan usaha milik desa (BUMDes)	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11		Dinas PMD
		1.1.2.6.7	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelatih pelatihan administrasi pemerintahan desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
		1.1.2.6.8	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan produk hukum desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
		1.1.2.6.9	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Jumlah pelatih pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
		1.1.2.6.10	Diklat Pendataan Potensi Penduduk	Jumlah petugas yang mampu melakukan pendataan potensi penduduk dengan akurat	11	Orang	55.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			11		Dinas PMD
		1.1.2.6.11	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Desa	Jumlah pelatih pelatihan penyusunan standar pelayanan minimal desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana		1			Dinas PMD
		1.1.2.6.12	Diklat Administrasi Perkantoran bagi Sekretaris Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang memahami tentang administrasi desa	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana				30	Dinas PMD
		1.1.2.6.13	Diklat Sistem Aplikasi Keuangan Desa	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sistem keuangan desa	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			2		Dinas PMD
		1.1.2.7	Urusan Perhubungan		5	Orang	25.000.000							
		1.1.2.7.1	Diklat Pengelola Terminal Bus	Jumlah pegawai yang mampu mengelola terminal bus	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf UPT Terminal			1		Dinas Perhubungan
		1.1.2.7.2	Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Usaha Angkutan Laut, Sungai dan Danau serta Pelayaran Rakyat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun SOP perizinan usaha ASDP dan pelayaran rakyat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perhubungan

	1.1.2.7.3	Diklat Pengelolaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal	3	Orang	15.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			3		Dinas Perhubungan
	1.1.2.8	Urusan Komunikasi dan Informatika		12	Orang	60.000.000							
	1.1.2.8.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.2	Diklat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis mengelola informasi dan komunikasi publik Pemda	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.3	Diklat Pengelolaan e-Government Daerah Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berbasis e-government	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.4	Diklat Jaringan Komputer dan Sistem Layanan Administrasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis membangun jaringan komputer dan sistem layanan administrasi berbasis IT	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.5	Diklat Sub Bidang Jasa Multimedia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jasa multimedia	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.6	Diklat Kehumasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang kehumasan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.7	Diklat Jaringan Telekomunikasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang jaringan telekomunikasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.8	Diklat Keahlian Grafis	Jumlah pegawai yang mampu merencanakan dan mendesain data dan informasi dalam bentuk grafis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.9	Diklat Manajemen Layanan TI	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya teknologi informasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.10	Diklat Pengembangan Pembuatan (Development) TI	Jumlah pegawai yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi informasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.11	Diklat Pemeliharaan (Maintenance) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memelihara perangkat komputer secara berkala	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.8.12	Diklat Piranti Lunak (Software) dan Keras (Hardware) Komputer	Jumlah pegawai yang mampu memperbaiki piranti lunak dan keras komputer secara berkala	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
	1.1.2.9	Urusan Koperasi dan UKM		12	Orang	60.000.000							
	1.1.2.9.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.2	Diklat Perkoperasian	Jumlah pegawai yang mampu membina koperasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.3	Diklat Kewirausahaan	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi peningkatan kewirausahaan di desa	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.4	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Keterampilan Teknis Koperasi dan UMKM	Jumlah pelatih pelatihan keterampilan teknis koperasi dan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM

	1.1.2.9.5	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Pengelola Koperasi	Jumlah pelatih pelatihan pengelola koperasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.6	Diklat Pengembangan Lembaga UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan lembaga UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.7	Diklat Pengembangan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem informasi koperasi dan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.8	Diklat Perkoperasian Berbasis Syariah	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan perkoperasian berbasis syariah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.9	Diklat Pengawasan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah pegawai yang mampu mengawasi dan membina koperasi simpan pinjam	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.9.10	Diklat Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pengembangan industri kecil dan menengah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
	1.1.2.10	Urusan Penanaman Modal		29	Orang	145.000.000							
	1.1.2.10.1	Diklat Pengelolaan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu menyusun dan mengelola peta potensi investasi daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.2	Diklat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		11			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.3	Diklat Pengelolaan Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pelaksanaan penanaman modal di daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.4	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal : Substansi OSS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis Online Single Submission (OSS)	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.5	Diklat promosi di Bidang Penanaman Modal	Jumlah pegawai yang mampu melakukan promosi dibidang penanaman modal	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.6	Diklat Job Instruction Training	Jumlah pegawai yang mampu menyusun job instruction	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.7	Diklat Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis penyelenggaraan PTSP secara optimal	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.10.8	Bimtek Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	Jumlah pegawai yang mampu menyelenggarakan PTSP sesuai kualifikasi tertentu	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas PMPTSPTK
	1.1.2.11	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		3	Orang	15.000.000							
	1.1.2.11.1	Penerapan NSPK bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.1.2.11.2	Diklat Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah pegawai yang mampu membina dan mengembangkan organisasi kepemudaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.1.2.11.3	Diklat Training of Training (TOT) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pelatih pelatihan penguatan dan pengembangan kewirausahaan pemuda	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

		1.1.2.12	Urusan Statistik dan Persandian		6	Orang	30.000.000						
		1.1.2.12.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Statistik dan Persandian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.2	Diklat Pengelolaan Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten	Jumlah pegawai yang mampu mengelola statistik sektoral	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.3	Diklat Pemanfaatan Data Ekonomi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan memanfaatkan data statistik ekonomi daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.4	Diklat Teknis Dasar-dasar Keamanan Jaringan dan Teknologi Informasi (Fundamental Network Security)	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan melindungi sistem jaringan dari serangan cyber	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.5	Diklat Teknis Kriptografi Simetrik, Asimetrik dan Steganografi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang simetrik, asimetrik dan steganografi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.12.6	Diklat Teknis Pengelolaan Database Persandian	Jumlah pegawai yang mampu mengelola database persandian daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
		1.1.2.13	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan		17	Orang	85.000.000						
		1.1.2.13.1	Diklat Penerapan NSPK bidang Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.2	Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan dan Etika Profesi Kepustakawanan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Tenaga Pustakawan		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.3	Diklat Peningkatan Minat dan Gemar Membaca	Jumlah pegawai yang mampu memfasilitasi masyarakat desa dan sekolah untuk meningkatkan minat dan gemar membaca	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.4	Diklat Manajemen Perpustakaan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.5	Diklat Pengembangan Perpustakaan (Berbasis Komputer)	Jumlah pegawai yang mampu membangun sistem perpustakaan elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.6	Diklat Pemeliharaan Koleksi	Jumlah pegawai yang mampu memelihara koleksi perpustakaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.2.13.7	Diklat Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Jumlah pegawai yang mampu mengelola arsip statis dan dinamis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan		162	Orang	810.000.000						
		1.1.3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan		10	Orang	50.000.000						
		1.1.3.1.1	Bimtek Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina mutu dan keamanan hasil perikanan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		2		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.2	Bimtek Manajemen Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek manajemen pengendalian hama dan penyakit ikan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan		2		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.3	Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1	Dinas Perikanan

		1.1.3.1.4	Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.5	Bimtek Training of trainers (TOT) Pengolahan komoditas laut (Panen dan Pasca Panen)	Jumlah Desa dengan petugas pemberdayaan nelayan yang memiliki kompetensi teknis bidang pengolahan budidaya laut	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.6	Bimtek Bagi Petugas Pembina Pengelolaan Pemberian Pakan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina pengelolaan pemberian pakan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.7	Bimtek Bagi Petugas Pembina Teknik Pembuatan Alat Tangkap Ikan	Jumlah Kecamatan yang memiliki petugas pembina teknik pembuatan alat tangkap ikan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.1.8	Bimtek Training of trainers (TOT) Pelatihan Budidaya Ikan Karang Bernilai Ekonomis Tinggi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek budidaya ikan karang bernilai ekonomis tinggi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Dinas Perikanan			1		Dinas Perikanan
		1.1.3.2	Urusan Pariwisata dan Kebudayaan		35	Orang	175.000.000							
		1.1.3.2.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.2	Diklat Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola obyek dan daya tarik wisata (ODTW) daerah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.3	Diklat Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengidentifikasi dan mengelola kawasan strategis pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.4	Diklat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.5	Diklat Pemasaran Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata baik domestik dan mancanegara	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.6	Diklat Kantor Depan (Front Office)	Jumlah pegawai yang mampu melayani wisatawan secara prima	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.7	Diklat Agen Perjalanan (Travel Agencies)	Jumlah pegawai yang mampu mendesain dan mengelola paket perjalanan wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.8	Diklat Pemandu Wisata	Jumlah obyek dan daya tarik wisata yang memiliki petugas pemandu wisata yang memiliki kompetensi teknis	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			4		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.9	Diklat Pengembangan Wisata Religi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan obyek dan daya tarik wisata religi	4	Orang	20.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			4		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.10	Diklat Membangun Kemitraan Pengembangan & Promosi Pariwisata	Jumlah pegawai yang mampu membangun kemitraan pengembangan dan promosi wisata	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.11	Diklat Pengelolaan SDM Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah pegawai yang mampu mengelola sumber daya pariwisata berbasis masyarakat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.1.3.2.12	Diklat Pengelolaan Kesenian Daerah	Jumlah pegawai yang mampu mengelola kesenian daerah	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		1.1.3.3	Urusan Pertanian (selain pangan) dan Peternakan		61	Orang	305.000.000						
		1.1.3.3.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Pertanian dan Peternakan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.2	Diklat Pengawasan dan Pembinaan	Jumlah pegawai yang mampu melakukan pengawasan dan pembinaan di bidang pertanian	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.3	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Juru Sembelih Halal	Jumlah pelatih pelatihan juru sembelih halal	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.4	Diklat Produksi Benih Tanaman	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang produksi benih tanaman	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf UPTD Pembenihan		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.5	Diklat Fasilitator Tanaman Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator tanaman organik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.6	Diklat Fasilitator Ternak Organik	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator ternak organik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.7	Diklat Teknologi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan teknologi pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.8	Diklat Komoditi Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan komoditi pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.9	Diklat Budidaya Pertanian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengembangan budidaya pertanian	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.10	Diklat Agrobisnis	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis di bidang agrobisnis	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.11	Diklat Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (PP)	Jumlah penyuluh yang memperoleh pengetahuan baru	30	Orang	150.000.000	BKPSDM	Penyuluh Pertanian		30		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.3.12	Diklat Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengawas benih tanaman	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.3.4	Urusan Energi Baru Terbarukan		5	Orang	25.000.000						
		1.1.3.4.1	Diklat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Bagi Operator dan/atau Pengelola	Jumlah operator/ pengelola yang mampu mengusahakan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.2	Diklat Teknis Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengelolaan PLTS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.3	Diklat Teknis Perencanaan dan Pembangunan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan dan pembangunan PLTS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.4	Diklat Teknis Pemasangan dan Pemeliharaan Solar Home Sistem (SHS)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemasangan dan pemeliharaan peralatan SHS	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan
		1.1.3.4.5	Diklat Teknis Evaluasi Perencanaan PLTS terpusat	Jumlah pegawai yang mampu mengevaluasi perencanaan pembangunan PLTS terpusat	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perhubungan

		1.1.3.5	Urusan Perdagangan		7	Orang	35.000.000							
		1.1.3.5.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.5.2	Diklat Pengelolaan Pasar Rakyat dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pasar rakyat dan mengurus perizinan toko swalayan	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.5.3	Diklat Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin bidang Perdagangan	Jumlah Pegawai yang mampu memahami dan menerapkan SOP perizinan dagang	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.5.4	Diklat Pengelolaan Sarana Industri Perdagangan	Jumlah pegawai yang mampu mengelola pemanfaatan sarana industri dagang	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			2	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6	Urusan Perindustrian		44	Orang	220.000.000							
		1.1.3.6.1	Diklat Penerapan NSPK Bidang Perindustrian	Jumlah pegawai yang mampu menerapkan NSPK dalam pelaksanaan tupoksinya	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi	1			Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.2	Diklat Perencanaan Pengembangan Industri Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun perencanaan pengembangan industri daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1		Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.3	Diklat Teknik Pembuatan Produk Kerajinan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pembuatan produk kerajinan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.4	Diklat Fasilitator Good Manufacturing Practices (GMP)	Jumlah pegawai yang mampu menjadi fasilitator GMP	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.5	Diklat Desain Produk Industri dan Kemasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mendesain produk industri dan kemasan	11	Orang	55.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			11	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.6	Diklat Penguji Mutu Barang	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penguji mutu barang	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf pelaksana			1	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.7	Diklat Manajemen Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajemen industri	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.8	Diklat Penyuluh Industri	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyuluh industri	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1	Dinas Perindag KUM	
		1.1.3.6.9	Diklat Desain Grafis dan Advertising	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi desain grafis dan periklanan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.10	Diklat Training of Trainers (TOT) Pelatihan Produksi Olahan Ikan dan Daging	Jumlah pelatih pelatihan produksi olahan ikan dan daging	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.11	Diklat Strategi Promosi dan Penjualan Melalui Internet	Jumlah pegawai yang mampu menyusun strategi promosi dan penjualan berbasis elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.12	Diklat Manajemen Keuangan UMKM	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial dibidang keuangan UMKM	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.13	Diklat Pengelolaan Usaha Pedagang Pasar	Jumlah pegawai yang mampu mengelola usaha perdagangan pasar	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM
		1.1.3.6.14	Diklat Manajemen Bisnis untuk Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi manajerial bisnis dibidang PKL	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Dinas Perindag KUM

		1.2	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi penyelenggara perangkat daerah penunjang		64	Orang	1.209.000.000							
		1.2.1	Urusan Bappelitbangda		14	Orang	126.000.000							
		1.2.1.1	Diklat Penyusunan RPJMD	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RPJMD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.2	Diklat Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun Renstra PD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.3	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun rencana kerja pemerintah daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.4	Diklat Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menyusun RKPD	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.5	Diklat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan daerah	2	Orang	18.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
		1.2.1.6	Diklat Reviu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi mereviu RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD	4	Orang	36.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		4			Bappelitbangda
		1.2.2	Urusan BPKPAD		16	Orang	96.000.000							
		1.2.2.1	Diklat Penganggaran Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.2	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang perbendaharaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.3	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.4	Diklat Penatausahaan Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.5	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan barang milik daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.6	Diklat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penganggaran daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.7	Diklat Penilaian Aset	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian aset	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BPKPAD
		1.2.2.8	Bimtek Keuangan Daerah	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman dibidang keuangan daerah	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana dan bendahara		2			BPKPAD
		1.2.3	Urusan BKPSDM		34	Orang	204.000.000							
		1.2.3.1	Diklat Manajemen Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman ruang lingkup manajemen PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
		1.2.3.2	Diklat Komunikasi Efektif	Jumlah pegawai yang mampu menguasai pemahaman tentang komunikasi efektif	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.3	Bimtek Persiapan Pensiun (Purna Bhakti) PNS	Jumlah pegawai yang telah memasuki masa pensiun yang mengikuti bimbingan purna bhakti	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Pegawai yang memasuki masa pensiun		2			BKPSDM

		1.2.3.4	Diklat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ASN	Jumlah pegawai yang mampu mengelola administrasi kepegawaian	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.5	Diklat Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Jumlah pegawai yang mampu menyusun kebutuhan formasi dan pengadaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.6	Diklat Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SKP	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.7	Diklat Penilaian Kinerja PNS	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian kinerja PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.8	Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah pegawai yang mampu menganalisa dan menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS	4	Orang	24.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		4			BKPSDM
		1.2.3.9	Diklat Manajemen Talenta	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen talenta	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.10	Diklat Pengembangan dan Pola Karir PNS	Jumlah pegawai yang mampu menyusun pola dan pengembangan karir PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.11	Diklat Penegakan Disiplin PNS	Jumlah pegawai yang mampu memahami ruang lingkup penegakan disiplin PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.12	Diklat Pengelolaan Promosi dan Mutasi PNS	Jumlah pegawai yang mampu mengelola promosi dan mutasi PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.13	Diklat Kepangkatan PNS	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup kepangkatan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.14	Bimtek Tata Cara Pemberian Penghargaan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang tata cara pemberian penghargaan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
		1.2.3.15	Bimtek Perlindungan PNS	Jumlah pegawai yang memiliki pemahaman tentang perlindungan PNS	2	Orang	12.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			BKPSDM
			Urusan Pendukung Pemerintahan		17	Orang	393.000.000							
		1.2.4	Urusan Sekretariat Daerah		17	Orang	93.000.000							
		1.2.4.1	Diklat Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menyusun Perda dan Perkada	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.2	Diklat Penanganan Perkara	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi menangani perkara di lingkup pemerintah daerah	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.3	Diklat Sistem Jaringan Dokumentasi Indormasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi merencanakan dan membangun JDIH pemerintah daerah	1	Orang	6.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.4	Diklat Advokasi Hukum	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang advokasi hukum	1	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Hukum
		1.2.4.5	Diklat Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah pegawai yang mampu menyusun anjab dan abk	2	Orang	10.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		2			Bagian Organisasi

		1.2.4.6	Diklat Pengembangan Organisasi	Jumlah pegawai yang mampu mengembangkan kebutuhan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Organisasi
		1.2.4.7	Diklat Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah pegawai yang mampu menyusun evjab	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Organisasi
		1.2.4.8	Diklat Manajemen Perkantoran Modern	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup manajemen perkantoran modern	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
		1.2.4.9	Diklat Menyusun Telaahan Staf dan Paripurna	Jumlah pegawai yang mampu menyusun telaahan staf dan paripurna	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Pemerintahan
		1.2.4.10	Bimtek Tata Cara Penyusunan SOP	Jumlah pegawai yang mampu memahami tata cara penyusunan SOP	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.11	Diklat Tata Naskah Dinas/ Elektronik	Jumlah pegawai yang mampu menguasai tata naskah dinas dan tata naskah elektronik	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.12	Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		1.2.4.13	Bimtek Tata Cara Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah pegawai yang mampu menguasai ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.14	Diklat Penataan Ruang Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.15	Diklat Penataan Lingkungan Perkantoran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penataan lingkungan kantor	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana				1	Bagian Umum dan Protokol
		1.2.4.16	Diklat Keprotokolan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang keprotokolan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana		1			Bagian Umum dan Protokol
		1.2.5	Urusan Sekretariat DPRD		35	Orang	300.000.000							
		1.2.5.1	Bimtek Peningkatan Kompetensi Anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	25	Orang	250.000.000	BKPSDM	Anggota DPRD			25		Sekretariat DPRD
		1.2.5.2	Bimtek Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan peningkatan kompetensi	10	Orang	50.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			10		Sekretariat DPRD
			Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan		78	Orang	390.000.000							
		1.2.6	Urusan Inspektorat		78	Orang	390.000.000							
		1.2.6.1	Manajemen Pengawasan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang manajemen pengawasan pemerintahan	4	Orang	20.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Pejabat Struktural Ess. III dan Auditor Madya		4			Inspektorat
		1.2.6.2	Diklat Audit Investigasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit investigasi	7	Orang	35.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		7			Inspektorat
		1.2.6.3	Diklat Pengawasan Intern Berbasis Resiko	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan intern berbasis risiko	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		1			Inspektorat

		1.2.6.4	Diklat Probit Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang probity audit	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		3			Inspektorat
		1.2.6.5	Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit	Jumlah pegawai yang mampu menulis laporan hasil audit	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		2			Inspektorat
		1.2.6.6	Diklat Audit Kinerja	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit kinerja	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		2			Inspektorat
		1.2.6.7	Diklat Audit Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit PAD	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		2			Inspektorat
		1.2.6.8	Diklat Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penilaian angka kredit JF auditor	1	Orang	5.000.000		Pejabat Struktural Ess. IV dan Pejabat Fungsional Auditor		1			Inspektorat
		1.2.6.9	Diklat Teknik Audit Berbantuan Komputer	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang audit berbantuan komputer	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor				1	Inspektorat
		1.2.6.10	Diklat Audit Keuangan Desa (Siswakeudes)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang audit keuangan desa	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat
		1.2.6.11	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penilaian maturitas SPIP	3	Orang	15.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		3			Inspektorat
		1.2.6.12	Diklat Tata Cara Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi reviu RKA	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor		4			Inspektorat
		1.2.6.13	Diklat Asesor Pemerintahan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang asesor pemerintahan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
		1.2.6.14	Diklat Penyusunan dan Penilaian AK P2UPD	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi penyusunan dan penilaian angka kredit P2UPD	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
		1.2.6.15	Diklat Pengawasan Tujuan Tertentu	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan tujuan tertentu	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
		1.2.6.16	Diklat Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
		1.2.6.17	Diklat Penyusunan Kertas Kerja Audit	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang penyusunan kertas kerja audit	4	Orang	20.000.000		Pejabat Fungsional Auditor			4		Inspektorat
		1.2.6.18	Diklat Penjenjangan Madya	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	2	Orang	10.000.000		Pejabat Fungsional P2UPD				2	Inspektorat
		1.2.6.19	Diklat Penjenjangan Muda	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi penjenjangan	1	Orang	5.000.000		Pejabat Fungsional Auditor				1	Inspektorat
		1.2.6.20	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang auditor ahli	3	Orang	15.000.000		Fungsional Umum				3	Inspektorat

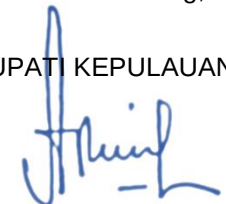
		1.2.6.21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang menguasai pemahaman implementasi peraturan perundang-undangan	30	Orang	150.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPKP	Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD, Fungsional Umum			30		Inspektorat
		1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum		3	Orang	15.000.000							
		1.3.1	Urusan Kesbangpol		3	Orang	15.000.000							
		1.3.1.1	Diklat Peningkatan Wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang memahami tentang wawasan kebangsaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		1.3.1.2	Diklat Ketahanan Nasional	Jumlah peserta yang memiliki kompetensi di bidang ketahanan nasional	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		1.3.1.3	Diklat Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta yang mampu memahami mekanisme penanganan konflik sosial	1	Orang	5.000.000	BKPSDM	Staf Pelaksana			1		Badan Kesbangpol
		II	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		439	Orang	4.001.105.000							
		2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.		439	Orang	4.001.105.000							
		2.1.1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN		439	Orang	4.001.105.000							
		2.1.1.1	Diklat Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas DPRD	25	Orang	175.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Anggota DPRD			25		Sekretariat DPRD
		2.1.1.2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki kompetensi manajerial tingkat II	5	Orang	151.305.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ LAN	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama		5			BKPSDM
		2.1.1.3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	Jumlah pejabat administrator yang memiliki kompetensi manajerial tingkat III	20	Orang	442.500.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPSDM Provinsi Sulsel/ LAN	Pejabat Administrator		20			BKPSDM
		2.1.1.4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Jumlah pejabat pengawas yang memiliki kompetensi manajerial tingkat IV	30	Orang	606.900.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPSDM Provinsi Sulsel/ LAN	Pejabat Pengawas		30			BKPSDM
		2.1.1.5	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Camat dan Lurah	Jumlah Camat dan Lurah yang memiliki kompetensi manajerial dibidang pemerintahan	18	Orang	126.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Camat dan Lurah			18		BKPSDM

	2.1.1.6	Diklat Peningkatan Kepemimpinan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang memiliki kemampuan manajerial dibidang pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Kepala Desa		30	30	27	Dinas PMD
	2.1.1.7	Diklat Pembekalan Aparat Perangkat Desa	Jumlah aparat desa yang memiliki kemampuan teknis dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa	87	Orang	435.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Aparat Desa		30	30	27	Dinas PMD
	2.1.1.8	Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah calon PNS yang memiliki kompetensi dibidang kepegawaian	120	Orang	1.394.400.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri/ BPSDM Provinsi Sulsel/ LAN	CPNS		120			BKPSDM
	2.1.1.9	Diklat Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional P2UPD			1		Inspektorat
	2.1.1.10	Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (POL-PP)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi polisi pamong praja	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Pol PP			10		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.11	Diklat Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pemadam kebakaran	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar			10		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.12	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis kebakaran	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional Damkar			1		Dinas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	2.1.1.13	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis standardisasi	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana/ Fungsional			1		Dinas Perindag KUM
	2.1.1.14	Diklat Jabatan Fungsional Administrator Database (ADB)	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis administrator database	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ BPSDM Kemendagri	Staf Pelaksana			1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.1.1.15	Diklat Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis auditor	4	Orang	20.000.000	BKPSDM, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Kemendagri, Badan Diklat BPK, Penyelenggara Lainnya	Staf Pelaksana/ Fungsional Auditor			4		Inspektorat
	2.1.1.16	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis analisis SDM	10	Orang	50.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Jabatan Administrasi dan Staf Pelaksana		10			BKPSDM
	2.1.1.17	Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengawas ketenagakerjaan	1	Orang	5.000.000	BKPSDM/ Pusdiklat Kemnaker	Staf Pelaksana/ Pengawas Ketenagakerjaan				1	Dinas PMPTSPK
	2.1.1.18	Diklat Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah	4	Orang	20.000.000	BKPSDM/ LKPP	Staf Pelaksana		4			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	2.1.1.19	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Diklat	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis diklat	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbangpeg ASN BKN	Staf Pelaksana		2			BKPSDM

		2.1.1.20	Diklat Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis perencana	2	Orang	10.000.000	BKPSDM/ Pusbindiklatren Bappenas	Staf Pelaksana		2			Bappelitbangda
			JUMLAH		1250	Orang	9.165.105.000							

Benteng, 11 Juni 2021


 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 H. MUH. BASLI ALI

WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

 H. SAIFUL ARIF, S.H.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dalam rangka mencapai visi ***“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Di Kawasan Timur Indonesia”***, dibutuhkan SDM aparatur yang memiliki integritas, profesional, bersih dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik.

Kondisi real saat ini, menurut data dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar pada Desember 2020, jumlah SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3766 orang. Dari data tersebut, secara kualitatif sekitar 65% memiliki tingkat pendidikan S1/S2/S3 dan sekitar 35% memiliki tingkat pendidikan SLTA/D1/D3. Selanjutnya realisasi anggaran pengembangan sumber daya manusia mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,16% pada Tahun 2018 meningkat menjadi 0,20% pada Tahun 2019.

Program Pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang disusun dalam rencana aksi ini, dikelompokkan dan diuraikan kedalam kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, antara lain :
 - a. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren sebanyak 27 (dua puluh tujuh) urusan dengan rincian sebagai berikut :
 - 7 (tujuh) urusan wajib pelayanan dasar;
 - 14 (empat belas) urusan wajib non pelayanan dasar;
 - 6 (enam) urusan pilihan.
 - b. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi penyelenggara perangkat daerah penunjang sebanyak 6 (enam) urusan, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) unsur penunjang;
 - 2 (dua) unsur pendukung pemerintahan;
 - 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan.
- c. Sub kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis penyelenggara urusan pemerintahan umum sebanyak 1 (satu) urusan.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, antara lain Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

5.2. Rekomendasi

1. Diharapkan dukungan penguatan kerjasama antar lembaga untuk menyelenggarakan pengembangan SDM aparatur di Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pengembangan kompetensi teknis SDM aparatur agar dilaksanakan setiap tahun dengan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK) dengan skala prioritas;
3. Penetapan kebijakan tentang pengembangan SDM aparatur di semua urusan pemerintahan;
4. Perlu dilaksanakan assessment bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional sesuai kebutuhan;
5. Peningkatan sistem pengembangan SDM aparatur terintegrasi dan menyesuaikan dengan sistem pengembangan SDM yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Kepulauan Selayar. 2021. Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka. Jakarta : Badan Pusat Statistik;
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kepulauan Selayar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Selayar), Halaman ini terakhir diubah pada 14 Juni 2021, pukul 13.22;
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 082-503 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan, Panduan Rencana Aksi dan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Kepulauan Selayar : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.